

**ANALISIS MODERASI BERAGAMA DALAM MENGEMBANGKAN  
KARAKTER INKLUSIF PESERTA DIDIK SMAN 15  
BANDAR LAMPUNG**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**Adi Kurnia Saputra**

**NPM 2213032016**



**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN  
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
2026**

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS MODERASI BERAGAMA DALAM MENGEMBANGKAN KARAKTER INKLUSIF PESERTA DIDIK SMAN 15 BANDAR LAMPUNG**

**Oleh**

**Adi Kurnia Saputra**

Pentingnya penguatan moderasi beragama di lingkungan sekolah sebagai upaya membangun karakter inklusif peserta didik di tengah keberagaman agama. SMA Negeri 15 Bandar Lampung memiliki komposisi peserta didik yang heterogen dari segi agama, sehingga berpotensi menjadi ruang strategis dalam menanamkan nilai toleransi, empati, dan komunikasi inklusif.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bentuk praktik moderasi beragama, menganalisis perannya dalam mengembangkan karakter inklusif peserta didik, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan melibatkan peserta didik, guru, dan pihak sekolah. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, serta diuji keabsahannya melalui triangulasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik moderasi beragama diwujudkan melalui pemberian kesempatan beribadah sesuai agama masing-masing, sikap adil guru dalam pembelajaran, pembagian kelompok belajar tanpa diskriminasi, serta kegiatan sosial lintas agama. Moderasi beragama berperan dalam menumbuhkan sikap toleransi, empati, kepedulian sosial, dan komunikasi terbuka antar peserta didik. Faktor pendukung meliputi budaya sekolah yang toleran dan kebijakan inklusif, sedangkan faktor penghambat berasal dari perbedaan karakter individu serta potensi candaan yang mengarah pada ejekan. Maka dari itu, moderasi beragama berkontribusi signifikan dalam membentuk karakter inklusif peserta didik di lingkungan sekolah multikultural.

**Kata Kunci:** Beragama, Empati, Inklusif, Moderasi, Toleransi

## **ABSTRACT**

### **ANALYSIS OF RELIGIOUS MODERATION IN DEVELOPING THE INCLUSIVE CHARACTER OF STUDENTS OF SMAN 15 BANDAR LAMPUNG**

**By**

**Adi Kurnia Saputra**

*This research is motivated by the importance of strengthening religious moderation in the school environment as an effort to build inclusive character in students amidst religious diversity. SMA Negeri 15 Bandar Lampung has a religiously heterogeneous student body, making it a strategic space for instilling the values of tolerance, empathy, and inclusive communication. This study aims to describe the practice of religious moderation, analyze its role in developing inclusive character in students, and identify supporting and inhibiting factors. The method used is qualitative research with a descriptive approach. Data collection techniques were conducted through interviews, observation, and documentation involving students, teachers, and school officials. Data analysis was conducted through data reduction, data presentation, and drawing conclusions, and its validity was tested through triangulation. The results indicate that the practice of religious moderation is manifested through providing opportunities for worship according to each student's religion, teachers' fairness in learning, non-discriminatory study group allocation, and interfaith social activities. Religious moderation plays a role in fostering tolerance, empathy, social awareness, and open communication among students. Supporting factors include a tolerant school culture and inclusive policies, while inhibiting factors stem from individual character differences and the potential for jokes to lead to ridicule. Therefore, religious moderation contributes significantly to shaping the inclusive character of students in multicultural school environments.*

**Keyword:** Religious, Empathetic, Inclusive, Moderate, Tolerant

**ANALISIS MODERASI BERAGAMA DALAM MENGEMBANGKAN  
KARAKTER INKLUSIF PESERTA DIDIK SMAN 15  
BANDAR LAMPUNG**

**Oleh:**

**Adi Kurnia Saputra**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Syarat Satu untuk Mencapai Gelar  
SARJANA PENDIDIKAN**

**Pada**

**Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  
Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial**



**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN  
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
2026**

Judul Skripsi

**: ANALISIS MODERASI BERAGAMA  
DALAM MENGEMBANGKAN KARAKTER  
INKLUSIF PESERTA DIDIK SMAN 15  
BANDAR LAMPUNG**

Nama Mahasiswa

**: Adi Kurnia Saputra**

NPM

**: 2213032016**

Program Studi

**: Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan**

Jurusan

**: Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial**

Fakultas

**: Keguruan dan Ilmu Pendidikan**



Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. Muhammad Mona Adha, S.Pd., M.Pd.**

**NIP 197911172005011002**

**Abdul Halim, S.Pd., M.Pd.**

**NIP 198305052025211069**

**2. Mengetahui**

**Ketua Jurusan Pendidikan  
Ilmu Pengetahuan Sosial**

**Koordinator Program Studi  
Pendidikan PKn**

**Dr. Bedy Miwar, S.Si., M.Pd.**

**NIP 197411082005011003**

**Dr. Yunisca Nurmalisa, M.Pd.**

**NIP 198706022008122001**

**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

**Ketua**

**: Dr. Muhammad Mona Adha, S.Pd., M.Pd.**



**Sekretaris**

**: Abdul Hallim, S.Pd., M.Pd.**



**Penguji**

**Bukan Pembimbing**

**: Dr. Yunisca Nurmalisa, M.Pd.**



**2. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan**



**Dr. Albet Maydiantoro, M.Pd.**

**NIP 19870504 2014041001**

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 8 April 2026**

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, adalah:

Nama : Adi Kurnia Saputra  
NPM : 2213032016  
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  
Jurusan : Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial  
Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan  
Alamat : JL Durian LK1 003/000 Korpri Jaya, Sukarame

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana disuatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar Pustaka.

Bandar Lampung, 8 April 2026

Adi   
NPM 2213032016

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Adi Kurnia Saputra, dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 20 Agustus 2004. Penulis merupakan anak kedua dari dua bersaudara

Pendidikan formal yang telah ditempuh penulis antara lain:

1. TK Negeri Liwa yang diselesaikan pada tahun 2010.
2. SD Negeri 2 Harapan Jaya yang diselesaikan pada tahun 2016.
3. MTS Negeri 2 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2019.
4. MA Negeri 1 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2022.

Pada tahun 2022 penulis diterima sebagai mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung melalui jalur masuk Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). Selama kuliah, penulis pernah aktif dalam organisasi kemahasiswaan Forum Pendidikan Kewarganegaraan (FORDIKA) sebagai anggota bidang dana usaha periode 2022.

Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) dengan tujuan Solo-Jogjakarta-Jakarta Tahun 2024 dan melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Tunggal Warga Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang serta melaksanakan Program Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP) di SD Negeri 01 Tunggal Warga, pada tahun 2025.

## **MOTTO**

“Apa yang sudah tertakar tidak akan tertukar.”

**(Adi Kurnia Saputra)**

## **PERSEMBAHAN**

*Bismillahirrohmanirrohim,*

Puji syukur kepada Allah SWT, Dzat Yang Maha Besar, Rabb yang senantiasa meneguhkan hati, pikiran, dan langkah penulis hingga mampu menyelesaikan karya ini. Dengan penuh kerendahan hati, penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

Kedua orang tua ku tercinta Ayah Rudi Kurniawan dan Almarhumah Mama Sapti Rinta . Terima kasih atas setiap doa yang tidak pernah putus, atas perjuangan dan pengorbanan yang tidak pernah bisa penulis hitung satu per satu. Terima kasih karena selalu menjadi sumber kekuatan, tempat kembali, serta rumah yang penuh kasih sayang. Semua dukungan, semangat, dan keikhlasan Ayah dan Mama adalah alasan terbesar penulis mampu bertahan hingga berada di titik ini. Penulis sadar bahwa tidak ada yang dapat benar-benar membalas seluruh kebaikan kalian, tetapi penulis akan terus berusaha untuk menjadi pribadi yang dapat membuat Ayah dan Mama tersenyum bangga.

Serta untuk almamater tercinta Universitas Lampung.

## SANWACANA

Puji Syukur kepada Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Moderasi Beragama dalam Mengembangkan Karakter Inklusif Peserta Didik Di SMAN 15 Bandar Lampung”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Pendidikan Universitas Lampung.

Terselesaikannya skripsi ini tentu tidak terlepas dari hambatan yang datang dari luar maupun dari dalam diri penulis. Berkat bimbingan, saran, motivasi dan bantuan baik moral maupun spiritual serta arahan dari berbagai pihak sehingga segala kesulitan dapat terlewati dengan baik. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Albet Maydiantoro, S.Pd., M.Pd., selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Riswandi, M.Pd., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
3. Bapak Bambang Riadi, S.Pd., M.Pd., selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
4. Bapak Hermi Yanzi, S.Pd., M.Pd., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
5. Bapak Dr. Dedy Miswar, S.Si., M.Pd., selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
6. Ibu Dr. Yunisca Nurmalisa, S.Pd., M.Pd., selaku Ketua Program Studi PPKn Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.

7. Bapak Dr. Muhammad Mona Adha, S.Pd., M.Pd., selaku Pembimbing Akademik (PA) serta pembimbing 1. Terima kasih telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, pikiran serta motivasi, ilmu dan nasihat kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Bapak Abdul Halim, S.Pd., M.Pd., selaku Pembimbing II. Terima kasih banyak telah membimbing, memberikan motivasi, ilmu, meluangkan waktu dan tenaga dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Ibu Dr. Yunisca Nurmalisa, S.Pd., M.Pd., selaku Pembahas I. Terima kasih banyak atas saran dan masukannya serta motivasi dan semangat yang diberikan dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Ibu Dian Permata Sari, S.Pd., M.Pd., selaku Pembahas II. Terima kasih banyak atas saran dan masukannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
11. Bapak dan Ibu Dosen dan Staf program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung, terima kasih banyak atas ilmu yang telah diberikan, motivasi dan semangat serta bantuan yang juga selalu diberikan.
12. Ibu Maria Habiba, S.Pd., M.Pd., selaku Kepala SMAN 15 Bandar Lampung dan Bapak Taronu, S.Pd., selaku Wakil Kepala SMAN 15 Bandar Lampung bidang kurikulum terima kasih banyak telah memberikan izin penelitian dan atas segala bantuan yang diberikan dalam penyelesaian skripsi ini.
13. Ibu Rhosita, S.Pd., selaku guru mata pelajaran Pendidikan Pancasila. Seluruh Bapak dan Ibu guru serta Staf Tata Usaha SMAN 15 Bandar Lampung yang telah memberikan bantuan, semangat dan dukungan yang penuh pada penulis selama melaksanakan penelitian pada peserta didik di SMAN 15 Bandar Lampung.
14. Teristimewa untuk kedua orang tua ku tercinta Ayah Rudi Kurniawan dan Mama Almarhumah Sapti Rinta serta Mbak ku tersayang, Venny Septi Kurniawan. Terima kasih telah memberikan kasih sayang, cinta kasih, pengorbanan, dukungan dan doa yang senantiasa mengiringi langkahku sehingga semua bisa berjalan dengan lancar.
15. Teman-teman program studi PPKn angkatan 2022 dan Fordika khususnya Kabinet Rakshabinaya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terima

kasih atas kebersamaannya selama ini, terima kasih atas kerja sama yang baik. Terima kasih untuk bantuan dalam segala hal selama perkuliahan dan ilmu serta pengalaman yang begitu banyak penulis dapatkan.

16. Teruntuk semua pihak yang tidak penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga ketulusan bapak, ibu, serta rekan-rekan semua mendapatkan pahala dari Allah SWT.

Bandar Lampung, 20 Januari 2026  
Penulis

Adi Kurnia Saputra  
NPM. 2213032016

## **KATA PENGANTAR**

Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Moderasi Beragama dalam Mengembangkan Karakter Inklusif Peserta Didik Di SMAN 15 Bandar Lampung” yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Semoga Allah SWT selalu memberikan kemudahan setiap langkah kita dan memberikan kesuksesan dunia dan akhirat, serta semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Bandar Lampung, 20 Januari 2026  
Penulis

Adi Kurnia Saputra  
NPM. 2213032016

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>iv</b>
<b>MEYETUJUI</b> .....	<b>v</b>
<b>MENGESAHKAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>viii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>ix</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>x</b>
<b>SANWACANA</b> .....	<b>xi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xx</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian.....	9
C. Pertanyaan penelitian .....	10
D. Tujuan Penelitian .....	10
E. Manfaat Penelitian .....	10
1. Manfaat Teoritis .....	10
2. Manfaat Praktis .....	11
F. Ruang Lingkup Penelitian .....	11
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>12</b>
A. Deskripsi Teori .....	12
1. Tinjauan Tentang Konsep Moderasi Beragama .....	12
2. Tinjauan Tentang Karakter Inklusif.....	35
3. Tinjauan Tentang Nilai Nilai Toleransi dalam Pendidikan .....	48
B. Kajian Penelitian Yang Relevan .....	57
C. Kerangka Berpikir .....	61
<b>III. METODOLOGI PENELITIAN</b> .....	<b>64</b>
A. Metode Penelitian .....	64
B. Waktu dan Tempat Penelitian .....	64

C. Kehadiran Peneliti .....	65
D. Data dan Sumber Data.....	65
E. Instrumen Penelitian .....	65
F. Teknik Pengumpulan Data.....	67
1. Metode Wawancara .....	70
2. Metode Observasi.....	70
3. Metode Dokumentasi .....	71
G. Uji Keabsahan Data.....	71
1. <i>Kredibilitas</i> (Kepercayaan) .....	71
2. <i>Confirmabilitas</i> (Kepastian).....	73
H. Teknik Analisa Data.....	73
<b>IV. HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>75</b>
A. Langkah-langkah Penelitian .....	75
1. Persiapan Pengajuan Judul.....	75
2. Penelitian Pendahuluan .....	75
3. Pengajuan Rencana Penelitian .....	76
4. Penyusunan Alat Pengumpulan Data .....	76
5. Pelaksanaan Penelitian .....	76
B. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	77
1. Deskripsi Lokasi Penelitian .....	77
2. Visi dan Misi SMAN 15 Bandar Lampung .....	77
3. Keadaan Gedung Sekolah dan Sarana Pendidikan.....	78
C. Deskripsi Hasil Penelitian.....	79
1. Praktik Moderasi Beragama di SMA Negeri 15 Bandar Lampung.....	80
2. Peran Moderasi Beragama dalam Mengembangkan Karakter Inklusif Peserta Didik.....	89
3. Faktor Pendukung dan Penghambat Moderasi Beragama dalam Membentuk Karakter Inklusif Peserta Didik.....	98
D. Pembahasan .....	103
1. Praktik Moderasi Beragama di SMA Negeri 15 Bandar Lampung.....	106
2. Peran Moderasi Beragama dalam Mengembangkan Karakter Inklusif Peserta Didik.....	111
3. Faktor Pendukung dan Penghambat Moderasi Beragama dalam Membentuk Karakter Inklusif Peserta Didik .....	116
E. Temuan Penelitian.....	119
<b>V. KESIMPULAN .....</b>	<b>122</b>
A. Kesimpulan.....	122
B. Saran .....	123
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>125</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>129</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
1. Jumlah Peserta Didik.....	7
2. Responden.....	66
3. Sarana Sekolah.....	78

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar</b>	<b>Halaman</b>
1. Kerangka Pikir .....	63
2. Triangulasi.....	73
3. Alur Analisi Data.....	74
4. Wawancara peserta didik (N) .....	81
5. Wawancara guru Pendidikan Pancasila.....	82
6. Kegiatan ibadah islam.....	83
7. Kegiatan ibadahmu Hindu.....	84
8. kegiatan ibadah Kristen.....	85
9. Wawancara pembina rohin .....	86
10. Wawancara peserta didik (NK).....	87
11. Kegiatan pembelajaran.....	88
12. Wawancara peserta (NA).....	90
13. Wawancara pembina rohkris .....	93
14. Wawancara peserta didik (M).....	95
15. Wawancara peserta didik (AF) .....	96
16. Wawancara guru PAI.....	97
17. Wawancara peserta didik (WO) .....	98
18. Kegiatan pembelajaran Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila.....	100

## DAFTAR LAMPIRAN

- |                 |  |
|-----------------|--|
| 1. Lampiran 1   | Surat Izin Penelitian Pendahuluan            |
| 2. Lampiran 2   | Surat Balasan Penelitian Pendahuluan         |
| 3. Lampiran 3   | Surat Izin Penelitian                        |
| 4. Lampiran 4   | Surat Balasan Penelitian                     |
| 5. Lampiran 5   | Pedoman Wawancara                            |
| 6. Lampiran 6   | Pedoman Dokumentasi                          |
| 7. Lampiran 7   | Pedoman Observasi                            |
| 8. Lampiran 8   | Dokumentasi Wawancara dengan Informan        |
| 9. Lampiran 9   | Dokumentasi Observasi Penelitian Pendahuluan |
| 10. Lampiran 10 | Dokumentasi Observasi Penelitian             |
| 11. Lampiran 11 | Transkrip Wawancara Peserta Didik            |
| 12. Lampiran 12 | Transkrip Wawancara Guru                     |
| 13. Lampiran 13 | Hasil Observasi                              |
| 14. Lampiran 14 | Hasil Dokumen                                |

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia dikenal sebagai negara dengan keberagaman agama, budaya, dan etnis yang begitu tinggi. Keberagaman ini merupakan bagian dari identitas nasional yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat sehari-hari. Namun, pluralitas tersebut juga menghadirkan tantangan, terutama dalam hal menjaga kerukunan dan harmoni antarpemeluk agama. Moderasi beragama hadir sebagai paradigma yang menekankan pentingnya sikap toleransi, keseimbangan, dan penghormatan terhadap perbedaan, sehingga dapat memperkuat persatuan bangsa (Rohman & Nurhadi, 2021). Nilai moderasi ini menjadi relevan dalam konteks kehidupan masyarakat modern yang semakin kompleks, di mana arus globalisasi turut memengaruhi cara individu memandang keberagaman. Hal tersebut menuntut setiap warga negara memiliki kesadaran kritis dalam menjaga keharmonisan kehidupan sosial yang beragam. Realitas sosial kontemporer, kemajuan teknologi informasi juga membawa dampak signifikan terhadap cara masyarakat berinteraksi dan menerima informasi, sehingga potensi penyebaran paham intoleran semakin mudah ditemukan di ruang digital. Jika tidak dibarengi dengan pemahaman keagamaan yang moderat, masyarakat rentan terprovokasi oleh narasi yang bersifat eksklusif dan diskriminatif.

Seiring meningkatnya mobilitas sosial dan interaksi lintas budaya, masyarakat Indonesia dihadapkan pada dinamika sosial yang melibatkan perbedaan nilai, keyakinan, serta orientasi budaya. Moderasi beragama berfungsi sebagai instrumen penting untuk mengelola perbedaan tersebut melalui dialog, sikap saling menghormati, dan empati dalam berinteraksi. Nilai-nilai ini membantu setiap individu dalam mengembangkan kompetensi sosial untuk hidup berdampingan dalam lingkungan heterogen tanpa menimbulkan gesekan. Dalam konteks negara multikultural, moderasi bukan hanya menjadi wacana, tetapi juga bentuk aktualisasi moral dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. dengan

demikian, moderasi beragama tidak hanya bertujuan mencegah konflik horizontal, tetapi juga membangun fondasi karakter bangsa yang inklusif, toleran, dan adaptif terhadap perubahan zaman. Praktik moderasi yang diinternalisasi sejak dini akan berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang damai, berkeadilan, dan saling menerima perbedaan sebagai kekayaan bangsa yang patut dijaga bersama.

Selain menjadi identitas nasional, keberagaman agama di Indonesia juga memberikan nilai sosial dan kultural yang menjadi kekuatan dalam membangun karakter bangsa. Namun, jika tidak dikelola dengan baik, keberagaman tersebut berpotensi menciptakan kesalahpahaman dan ketegangan antar kelompok. Moderasi beragama tidak hanya berfungsi sebagai pedoman berinteraksi, tetapi juga sebagai fondasi untuk memperkuat bingkai kebangsaan di tengah perbedaan. Konsep ini menekankan pentingnya menghindari sikap ekstrem, baik liberal maupun konservatif, sehingga kehidupan beragama tetap berada dalam koridor yang kontekstual dan harmonis. Moderasi beragama menjadi strategi penting dalam menciptakan rasa aman, nyaman, dan damai di antara warga negara yang plural.

Penerapan moderasi beragama menjadi strategi penting dalam menciptakan rasa aman, nyaman, dan damai di antara warga negara yang plural. Nilai ini juga berkaitan erat dengan penguatan toleransi, solidaritas, dan integrasi sosial dalam kehidupan sehari-hari. Praktik moderasi memungkinkan setiap individu untuk menjalin dialog lintas agama, bertukar wawasan, serta mengelola perbedaan secara konstruktif. Selain itu, moderasi beragama dapat mendorong pembentukan lingkungan sosial yang inklusif, sehingga setiap warga negara merasa diterima dan dihargai keberadaannya. Implementasi nilai moderasi beragama secara konsisten akan membantu mencegah potensi radikalisme dan fragmentasi sosial, sekaligus memperkuat ketahanan nasional.

Internalisasi nilai moderasi dalam kehidupan beragama memiliki implikasi jangka panjang dalam membangun etika publik yang beradab. Masyarakat yang terbiasa dengan dialog, kesabaran, dan penghormatan terhadap perbedaan akan menciptakan budaya sosial yang humanis dan demokratis. Dalam ranah kebijakan, moderasi beragama dapat menjadi landasan dalam menyusun regulasi yang

berorientasi pada perlindungan hak kelompok minoritas, serta pengelolaan keberagaman secara adil. Moderasi beragama tidak hanya menjadi konsep teoretis, tetapi juga prinsip praktis yang berperan penting dalam menjaga stabilitas nasional di tengah dinamika global. Hanya melalui pendekatan yang inklusif, bangsa Indonesia dapat terus mempertahankan identitasnya sebagai negara yang damai, beradab, dan bermartabat.

Sekolah menjadi ruang strategis dalam menanamkan nilai-nilai toleransi dan moderasi beragama. Peserta didik yang berasal dari latar belakang agama berbeda berinteraksi dalam satu lingkungan, sehingga sekolah dituntut mampu menciptakan suasana yang kondusif untuk mengembangkan sikap saling menghargai. Interaksi yang terjadi secara rutin dalam proses pembelajaran, kegiatan ekstrakurikuler, hingga hubungan informal antar siswa dapat menjadi laboratorium sosial tempat nilai toleransi dipraktikkan secara nyata. Sekolah yang mampu mengelola keberagaman dengan baik akan membentuk budaya inklusif yang memupuk rasa empati dan solidaritas antarpeserta didik, proses pendidikan tidak hanya berorientasi pada pencapaian akademik semata, tetapi juga pada pembentukan karakter sosial yang peka terhadap perbedaan.

Penting mengingat usia remaja merupakan fase pencarian identitas yang rawan terhadap pengaruh intoleransi maupun sikap eksklusif dalam beragama (Fadillah et al., 2020). Pada tahap ini, peserta didik cenderung mudah dipengaruhi oleh lingkungan sosial, media digital, dan kelompok sebaya yang berpotensi membentuk pola pikir diskriminatif apabila tidak diarahkan dengan benar. Remaja sering kali memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan sering menjadikan kelompok tertentu sebagai referensi pembentukan opini, sehingga penyampaian informasi yang keliru dapat berdampak pada cara mereka memandang perbedaan. Sikap tersebut dapat berkembang menjadi pola pikir stereotip, superioritas kelompok, dan bahkan tindakan diskriminatif terhadap teman berbeda agama. Sekolah memiliki tanggung jawab signifikan dalam memberikan edukasi yang tepat mengenai keberagaman melalui dialog, pendampingan psikologis, serta penanaman nilai spiritual yang sejalan dengan kebangsaan.

Perkembangan teknologi informasi mempermudah penyebaran konten keagamaan yang tidak selalu sejalan dengan nilai kebangsaan dan toleransi. Remaja yang belum memiliki kemampuan literasi digital memadai dapat terpapar paham radikal tanpa disadari, terutama melalui media sosial, forum virtual, dan grup komunitas tertentu. Guru berperan sebagai figur otoritatif yang dapat menjadi rujukan dalam mengklarifikasi konsep keagamaan yang keliru. Pendidik tidak hanya mengajar materi dalam buku, tetapi juga memberikan contoh konkret mengenai cara hidup berdampingan secara damai dalam keberagaman. Praktik pembelajaran berbasis kolaborasi antarpeserta didik dari berbagai latar belakang menjadi wadah potensial untuk membangun pengalaman sosial yang toleran dan egaliter.

Sekolah memiliki peran yang tidak hanya sebatas mengajarkan ilmu pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter dan kepribadian peserta didik. Interaksi antarteman sebaya yang berbeda agama dapat menjadi peluang untuk mengembangkan empati dan menumbuhkan kesadaran sosial. Guru dan pihak sekolah dituntut untuk memberikan ruang dialog yang sehat agar peserta didik dapat mengekspresikan pendapatnya tanpa menyinggung keyakinan pihak lain, sekolah menjadi wadah strategis untuk melatih keterampilan sosial yang berorientasi pada perdamaian dan kebersamaan.

Pembinaan nilai moderasi beragama di sekolah berkontribusi pada pembentukan generasi yang siap menghadapi tantangan multikultural di masa depan. Remaja yang terbiasa berdialog dengan sehat akan memiliki keterampilan sosial yang baik, mampu menyelesaikan konflik secara damai, serta memiliki kepekaan terhadap isu kemanusiaan. Nilai-nilai ini penting sebagai bekal kehidupan bermasyarakat dan bernegara, terutama di Indonesia yang dikenal kaya akan pluralitas. Pendidikan moderasi beragama bukan hanya memenuhi kebutuhan akademik, tetapi juga menjadi fondasi dalam membangun karakter generasi yang berintegritas, nasionalis, dan berkepribadian inklusif. Jika sekolah konsisten menginternalisasikan konsep ini, maka potensi konflik berbasis agama pada masa mendatang dapat ditekan, dan budaya harmonis antarumat beragama dapat semakin menguat dalam kehidupan sosial siswa maupun masyarakat luas.

Pentingnya menanamkan nilai moderasi beragama di sekolah juga sejalan dengan kebijakan Kementerian Agama yang mendorong pendidikan sebagai medium strategis untuk memperkuat wawasan kebangsaan dan sikap toleransi (Kemenag RI, 2021). Apabila tidak dikelola dengan baik, perbedaan agama dalam lingkungan sekolah dapat berpotensi menimbulkan konflik interpersonal, eksklusivisme, dan bahkan diskriminasi. Sebaliknya, jika dikelola melalui pendekatan moderasi beragama, keberagaman justru dapat menjadi modal sosial untuk memperkuat integrasi dan kohesi sosial antarpeserta didik (Hasanah & Wulandari, 2022). Pendekatan tersebut menekankan pentingnya komunikasi inklusif dan kolaborasi sebagai bagian dari penguatan karakter kebangsaan.

Kebijakan pemerintah dalam memperkuat moderasi beragama di sekolah sejatinya bertujuan untuk menciptakan generasi yang memiliki wawasan kebhinekaan dan mampu merawat persatuan bangsa. Implementasi moderasi beragama dalam kurikulum dan kegiatan nonformal sekolah dapat menjadi indikator keberhasilan lembaga pendidikan dalam membangun budaya toleransi, dengan adanya program tersebut, peserta didik diharapkan mampu memahami dampak negatif dari intoleransi dan mengembangkan sikap terbuka terhadap perbedaan keyakinan, ini menjadi bagian integral dalam upaya nasional mencegah konflik horizontal yang berkaitan dengan agama.

Data nasional menunjukkan bahwa kasus intoleransi di kalangan remaja masih menjadi perhatian serius. Survei Setara Institute (2022) mengungkapkan bahwa praktik intoleransi di sekolah kerap terjadi, mulai dari perilaku diskriminatif hingga pengucilan teman berbeda agama. Fakta ini menguatkan pentingnya penelitian tentang moderasi beragama di lingkungan sekolah menengah, sebab pendidikan merupakan basis awal pembentukan civic values yang akan terbawa hingga ke kehidupan bermasyarakat (Lestari, 2023). Kasus-kasus tersebut terjadi bukan hanya karena minimnya wawasan keberagaman, tetapi juga kurangnya pengawasan terhadap interaksi sosial di lingkungan pendidikan.

Fenomena ini menunjukkan bahwa sekolah membutuhkan strategi pembelajaran yang dapat menanamkan nilai-nilai multikultural secara efektif. Dengan adanya pemahaman moderasi beragama sejak dini, peserta didik dapat belajar

menghormati setiap bentuk keberagaman tanpa memaksakan nilai keyakinannya terhadap orang lain. Pendidikan yang berorientasi pada toleransi diharapkan mampu mencegah berkembangnya sikap radikal dan stereotip negatif terhadap kelompok tertentu. Penelitian dalam konteks ini menjadi bahan evaluasi penting dalam pengembangan kebijakan pendidikan nasional.

Kondisi serupa juga tampak di Provinsi Lampung yang dikenal sebagai daerah multikultural dengan tingkat heterogenitas agama dan budaya yang cukup tinggi. Menurut data BPS (2022), komposisi masyarakat Lampung terdiri dari berbagai pemeluk agama, di antaranya Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha. Kondisi ini menciptakan dinamika sosial yang unik, termasuk di lembaga pendidikan formal. Penting untuk meneliti bagaimana kerukunan antarumat beragama dibangun di lingkungan sekolah yang berada dalam konteks masyarakat multikultural seperti Lampung. Interaksi lintas agama di daerah tersebut menjadi potret kehidupan sosial yang mencerminkan realitas kebangsaan secara lebih luas.

Keberagaman di Lampung tidak hanya terlihat pada agama, tetapi juga dalam aspek adat dan budaya. Masyarakatnya terdiri dari penduduk asli dan transmigran yang telah lama tinggal berdampingan. Kondisi ini menjadikan sekolah sebagai miniatur masyarakat yang multikultural dan berpotensi menjadi laboratorium pembelajaran toleransi. Dinamika sosial tersebut juga membawa tantangan tersendiri, terutama dalam membina hubungan sosial yang harmonis antar peserta didik di sekolah sehingga diperlukan pendekatan pendidikan yang holistik dalam memfasilitasi pemahaman keberagaman.

Fenomena menarik terjadi di SMA Negeri 15 Bandar Lampung. Sekolah ini memiliki keragaman agama yang cukup tinggi di kalangan peserta didiknya. Berdasarkan data kelas XI tahun ajaran 2024/2025, jumlah siswa sebanyak 278 orang dengan komposisi agama sebagai berikut: Islam 240 peserta didik (86,33%), Kristen 30 peserta didik (10,79%), dan Hindu 8 peserta didik (2,88%). Keberagaman ini menjadikan SMA tersebut sebagai sekolah yang kaya akan interaksi multikultural. Keunikan tersebut tidak muncul karena adanya konflik atau intoleransi, melainkan menjadi ciri khas yang memperkaya dinamika sosial

siswa dalam kehidupan sekolah sehari-hari. Lingkungan sekolah seperti ini sangat potensial untuk memupuk kebiasaan hidup damai dalam keberagaman.

**Tabel 1.** Jumlah Siswa

<b>Agama</b>	<b>Jumlah Peserta Didik</b>	<b>Persentase</b>
Islam	240 Peserta Didik	86,33 %
Kristen	30 Peserta Didik	10,79 %
Hindu	8 Peserta Didik	2,88 %
Total	278 Peserta Didik	100 %

*Sumber : peneliti, 2025*

Data ini menunjukkan bahwa meskipun mayoritas siswa beragama Islam, terdapat pula siswa beragama Kristen dan Hindu dalam jumlah yang signifikan.

Keberagaman ini menjadikan SMA Negeri 15 Bandar Lampung sebagai sekolah yang kaya akan interaksi multikultural. Keunikan tersebut tidak muncul karena adanya konflik atau intoleransi, melainkan menjadi ciri khas yang memperkaya dinamika sosial siswa dalam kehidupan sekolah sehari-hari.

Meskipun keberagaman tersebut menunjukkan harmoni, bukan berarti tidak terdapat potensi konflik. Interaksi sosial yang tidak dikelola dengan baik dapat memunculkan stereotip berbasis agama serta praktik pemisahan kelompok. Sekolah perlu memiliki kebijakan eksplisit dalam menciptakan suasana belajar yang inklusif. Melalui pendekatan moderasi beragama, sekolah dapat menjadi wadah yang mendorong peserta didik untuk berkolaborasi tanpa mempermasalahkan perbedaan keyakinan. Pendekatan tersebut menjadi strategi preventif dalam mengurangi potensi friksi antarpeserta didik.

Keberagaman agama di SMA Negeri 15 Bandar Lampung bukan hanya menjadi kekayaan sosial, tetapi juga berpotensi menimbulkan permasalahan apabila tidak dikelola dengan baik. Perbedaan keyakinan di kalangan peserta didik dapat memunculkan gesekan, terutama terkait kegiatan keagamaan, penggunaan fasilitas sekolah, maupun perayaan hari besar keagamaan. Fenomena intoleransi dan sikap eksklusif dalam beragama yang masih kerap muncul di kalangan pelajar Indonesia berpotensi pula terjadi di lingkungan sekolah ini. Jika tidak ada upaya sistematis untuk menanamkan nilai moderasi beragama, keberagaman yang ada bisa berubah menjadi sumber konflik, diskriminasi, bahkan pengelompokan sosial antar siswa.

Untuk mengantisipasi potensi tersebut, sekolah perlu melakukan langkah-langkah strategis melalui kegiatan pembelajaran maupun pembinaan karakter. Program-program sekolah yang melibatkan lintas agama dapat menjadi sarana untuk memperkuat solidaritas antarpeserta didik. Selain itu, dukungan guru dan tenaga kependidikan menjadi faktor penting untuk memastikan bahwa setiap peserta didik mendapatkan hak yang sama dalam berpartisipasi dalam kegiatan sekolah. Sekolah dapat memposisikan diri sebagai agen perubahan dalam pembentukan karakter multikultural peserta didik.

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kerukunan antar umat beragama di sekolah dapat menjadi faktor pendukung terciptanya iklim belajar yang harmonis. Lestari (2020) menemukan bahwa sekolah dengan keragaman agama yang dikelola baik mampu menumbuhkan rasa saling menghargai dan solidaritas. Sementara itu, studi lain oleh Sari (2021) menegaskan bahwa kegiatan ekstrakurikuler lintas agama menjadi wadah strategis dalam memperkuat toleransi di kalangan peserta didik. Melalui kegiatan tersebut, peserta didik belajar bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama, terlepas dari perbedaan keyakinan.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa ruang interaksi sosial yang inklusif memberikan kontribusi besar dalam mengurangi prasangka dan stereotip yang berkembang di kalangan pelajar. Program moderasi beragama di sekolah bukan hanya bertujuan untuk menciptakan kondisi belajar yang nyaman, tetapi juga menyiapkan generasi yang mampu berkontribusi dalam pembangunan bangsa yang plural. Hasil penelitian tersebut menjadi landasan penting bagi penelitian ini untuk menguji ketercapaian nilai moderasi beragama di lingkungan sekolah.

Penelitian mengenai analisis moderasi beragama dalam keberagaman agama peserta didik di SMAN 15 Bandar Lampung menjadi sangat relevan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami dinamika interaksi siswa lintas agama, mengidentifikasi faktor penguat dan penghambat moderasi beragama, serta memberikan rekomendasi praktis bagi pengembangan kebijakan pendidikan multikultural di sekolah. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi lembaga pendidikan lain dalam mengelola keberagaman peserta didiknya secara konstruktif.

Urgensi penelitian ini semakin kuat mengingat meningkatnya paparan ideologi intoleran melalui media digital. Lingkungan sekolah yang heterogen dapat menjadi indikator bagaimana nilai moderasi beragama diinternalisasi oleh peserta didik. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai upaya yang telah dilakukan sekolah dalam menumbuhkan sikap moderat serta menghadapi tantangan sosial yang muncul akibat perbedaan agama.

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah literatur mengenai moderasi beragama di lingkungan pendidikan, sekaligus menjadi referensi dalam implementasi pendidikan multikultural dan penguatan karakter kebangsaan di sekolah. Dengan adanya kajian yang mendalam, sekolah dapat menyusun strategi yang lebih tepat sasaran dalam membina peserta didiknya agar mampu menjalankan kehidupan sosial yang toleran. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan bagi pengambil kebijakan dalam memperkuat program moderasi beragama pada lingkup yang lebih luas.

Pada akhirnya, penelitian ini tidak hanya berorientasi pada pengembangan teori, tetapi juga memberikan dampak praktis bagi kehidupan sosial di lingkungan sekolah. Penguatan moderasi beragama akan menciptakan generasi yang mampu menghargai perbedaan dan menjunjung tinggi nilai persatuan. Dengan begitu, sekolah dapat berperan aktif dalam mempersiapkan peserta didik menghadapi tantangan kebhinekaan di masa mendatang tidak hanya sebagai individu terdidik, tetapi juga sebagai warga negara berkarakter kebangsaan yang kuat.

## **B. Fokus Penelitian**

Penelitian ini difokuskan pada upaya menganalisis moderasi beragama dalam keberagaman agama peserta didik di SMA Negeri 15 Bandar Lampung. Fokus penelitian mencakup bagaimana bentuk-bentuk praktik moderasi beragama yang tercermin dalam interaksi sehari-hari, baik dalam kegiatan akademik, non-akademik, maupun hubungan sosial antar siswa yang berbeda agama. Selain itu, penelitian ini juga menelaah faktor-faktor yang mendukung terciptanya sikap moderat dalam beragama di lingkungan sekolah, termasuk peran guru, kebijakan sekolah, kegiatan keagamaan, serta nilai-nilai toleransi yang berkembang di kalangan peserta didik. Tidak hanya itu, penelitian ini juga mengkaji berbagai

hambatan atau tantangan dalam internalisasi moderasi beragama, baik yang bersumber dari internal siswa, lingkungan pertemanan, maupun faktor eksternal seperti pengaruh keluarga dan media sosial.

### **C. Pertanyaan penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian, maka rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana bentuk praktik moderasi beragama di SMA Negeri 15 Bandar Lampung?
2. Bagaimana peran moderasi beragama dalam mengembangkan karakter inklusif peserta didik?
3. Faktor apa saja yang mendukung dan menghambat penguatan moderasi beragama dalam membentuk karakter inklusif peserta didik di SMAN 15 Bandar Lampung?

### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

1. Mendeskripsikan bentuk-bentuk praktik moderasi beragama yang terwujud di kalangan peserta didik SMA Negeri 15 Bandar Lampung.
2. Mengungkap peran moderasi beragama dalam mengembangkan karakter inklusif peserta didik di SMA Negeri 15 Bandar Lampung.
3. Mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi dalam mengimplementasikan moderasi beragama di SMA Negeri 15 Bandar Lampung.

### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan teori dalam bidang pendidikan, khususnya dalam kajian Pendidikan Pancasila terkait pengelolaan keberagaman di lingkungan sekolah. Temuan penelitian ini dapat memperkaya literatur mengenai analisis kerukunan antar umat agama pada peserta didik serta memperkuat pendekatan multikultural dalam dunia pendidikan.

## **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini dapat menjadi acuan praktis bagi guru, kepala sekolah, dan tenaga kependidikan dalam merancang strategi pembelajaran yang inklusif dan toleran di sekolah menengah. Temuan ini juga dapat digunakan sebagai dasar dalam menyusun kebijakan sekolah yang mendukung moderasi beragama pada peserta didik.

## **F. Ruang Lingkup Penelitian**

### **1. Subjek Penelitian**

Penelitian ini difokuskan pada peserta didik SMA Negeri 15 Bandar Lampung yang memiliki latar belakang agama berbeda, yaitu Islam, Kristen, dan Hindu.

### **2. Objek Penelitian**

Objek kajian adalah moderasi beragama yang diwujudkan dalam bentuk interaksi sehari-hari, baik di dalam kelas, kegiatan sekolah, maupun aktivitas non-akademik.

### **3. Lokasi Penelitian**

Penelitian dilaksanakan di SMA Negeri 15 Bandar Lampung yang merupakan sekolah dengan tingkat keragaman agama cukup tinggi di kalangan siswanya.

### **4. Aspek yang Diteliti**

Penelitian ini mencakup bentuk-bentuk moderasi beragama, faktor-faktor yang mendukung terjalannya kerukunan, serta hambatan atau tantangan yang dihadapi dalam menjaga kerukunan antar umat beragama di sekolah.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Deskripsi Teori**

#### **1. Tinjauan Tentang Konsep Moderasi Beragama**

##### **a. Pengertian Moderasi beragama**

Moderasi beragama merupakan salah satu konsep penting yang berkembang dalam wacana kehidupan beragama di Indonesia. Istilah ini merujuk pada cara pandang, sikap, dan praktik beragama yang menempatkan keseimbangan antara pengamalan ajaran agama dengan penghormatan terhadap keberagaman. Moderasi beragama hadir sebagai strategi untuk menjaga kerukunan, menghindari sikap ekstrem, dan membangun ruang dialog yang sehat di tengah pluralitas masyarakat. Menurut Kementerian Agama Republik Indonesia (2019), moderasi beragama adalah cara pandang, sikap, dan praktik beragama dengan selalu mengambil posisi tengah, adil, dan seimbang dalam memahami serta mengamalkan ajaran agama. Konsep ini bukan bermaksud mengurangi kualitas iman seseorang, melainkan mengajarkan bagaimana agama dihayati secara mendalam sekaligus dijalankan dengan toleransi terhadap perbedaan.

Dalam konteks pendidikan, moderasi beragama memiliki arti penting karena sekolah menjadi ruang perjumpaan antar peserta didik dari berbagai latar belakang. Pendidikan tidak hanya berfungsi mentransfer pengetahuan, tetapi juga menanamkan nilai-nilai kebersamaan dan kebangsaan. Implementasi moderasi beragama di sekolah bertujuan untuk membiasakan siswa agar tidak hanya memahami agamanya sendiri, tetapi juga menghargai perbedaan keyakinan yang dianut orang lain. Menurut Rahmawati (2021), pendidikan berbasis moderasi beragama dapat memperkuat sikap inklusif peserta didik sekaligus mengurangi potensi terjadinya diskriminasi dan konflik berbasis agama. Sekolah berperan strategis dalam membudayakan moderasi beragama di tengah generasi muda.

Pengertian moderasi beragama juga dapat dipahami dari perspektif global. UNESCO (2020) menekankan bahwa pendidikan untuk perdamaian (*education for peace*) dan dialog antar budaya sangat penting dalam membangun masyarakat yang damai. Nilai-nilai yang terkandung dalam moderasi beragama memiliki keselarasan dengan prinsip pendidikan global tersebut, yakni menolak ekstremisme, mengedepankan dialog, serta menghargai keberagaman. Menunjukkan bahwa moderasi beragama tidak hanya relevan dalam konteks Indonesia, tetapi juga merupakan nilai universal yang mendukung terciptanya perdamaian dunia.

Moderasi beragama juga berfungsi sebagai strategi kebudayaan yang menguatkan ketahanan sosial bangsa. Dalam realitas masyarakat Indonesia yang plural, sikap keberagaman yang moderat menjadi modal sosial untuk mencegah fragmentasi dan menjaga stabilitas nasional. Penelitian oleh Anwar (2022) menunjukkan bahwa praktik moderasi beragama yang diterapkan dalam kegiatan sosial kemasyarakatan terbukti mampu meredam potensi konflik horizontal berbasis agama. Moderasi beragama tidak hanya berfungsi pada tataran individu, tetapi juga pada level kolektif untuk menciptakan harmoni sosial.

Moderasi beragama harus dipahami sebagai upaya berkelanjutan, bukan program sesaat. Sekolah dan institusi pendidikan memiliki peran signifikan dalam mentransformasikan nilai-nilai moderasi beragama menjadi bagian dari kurikulum, kegiatan ekstrakurikuler, maupun pembiasaan sikap sehari-hari. Guru berperan sebagai teladan yang menunjukkan sikap toleran, adil, dan terbuka. Peserta didik didorong untuk menginternalisasi nilai-nilai tersebut melalui pengalaman nyata dalam interaksi sosial. Menurut Putra (2021), implementasi moderasi beragama yang dilakukan melalui pendidikan formal dan nonformal berkontribusi nyata terhadap pembentukan karakter generasi muda yang inklusif.

Pengertian moderasi beragama tidak dapat dilepaskan dari upaya mewujudkan harmoni dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Moderasi beragama bukan sekadar terminologi akademik, melainkan sebuah

paradigma yang menekankan keseimbangan, penghargaan terhadap perbedaan, dan komitmen bersama untuk menjaga persatuan. Dalam konteks pendidikan, moderasi beragama menjadi fondasi penting dalam membentuk peserta didik yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga matang secara moral dan sosial untuk hidup berdampingan secara damai di tengah keberagaman.

Moderasi beragama merupakan pendekatan keberagamaan yang mengedepankan keseimbangan, keterbukaan, kebijaksanaan, dan penghargaan terhadap keberagaman dalam kehidupan sosial. Di era modern, konsep ini dipahami tidak hanya sebagai sikap keagamaan personal, tetapi juga sebagai respons konstruktif terhadap fenomena sosial baru yang dibawa oleh globalisasi, digitalisasi, dan transformasi budaya. Dalam konteks tersebut, moderasi beragama diperlukan untuk menjaga kohesi sosial di tengah arus perubahan yang cepat dan kompleks (Damopolii, 2024).

Era modern ditandai oleh keterhubungan global yang memungkinkan pertukaran gagasan lintas negara, agama, dan budaya. Kondisi ini memunculkan peluang dialog antaragama, tetapi pada saat yang sama juga menimbulkan potensi gesekan identitas. Arus globalisasi informasi bergerak tanpa filter yang memadai, sehingga konten keagamaan yang ekstrem dapat menyebar dan membentuk polarisasi sosial dalam waktu singkat (Mukhibat et al., 2024). Dalam kondisi demikian, moderasi beragama berfungsi sebagai strategi epistemik untuk membangun kesadaran kritis masyarakat terhadap fenomena radikalisme wacana keagamaan.

Digitalisasi menjadi salah satu faktor utama yang menandai era modern. Platform media sosial telah membuka ruang baru bagi diskusi keagamaan, tetapi juga menjadi medium subur bagi penyebaran ujaran kebencian dan intoleransi. Penelitian menunjukkan bahwa kelompok intoleran menggunakan media digital untuk membangun narasi eksklusif melalui framing simbolik yang memengaruhi opini publik (Khasanah, 2023). Moderasi beragama dalam konteks ini bukan hanya soal ajaran normatif, tetapi juga literasi digital dan kemampuan mengidentifikasi narasi

keagamaan yang manipulatif. Penguatan moderasi memerlukan pendekatan literasi media, dialog daring yang sehat, serta pendidikan digital di sekolah dan perguruan tinggi (Ikhwan, Azhar, & Alfiyanto, 2023).

Tantangan lain di era modern adalah meningkatnya politik identitas. Agama sering dijadikan simbol legitimasi untuk kepentingan kekuasaan tertentu, memunculkan pengelompokan masyarakat berdasarkan “kami” dan “mereka”. Kondisi tersebut dapat memicu stereotip dan konflik horizontal. Moderasi beragama hadir sebagai penegasan kembali bahwa agama mengajarkan kemanusiaan universal, keadilan, dan kesetaraan (Habibie et al., 2021). Sikap moderat mengingatkan masyarakat untuk menolak instrumentalisasi agama dalam wacana politik yang memecah belah, serta mendorong dialog berbasis argumen dan nilai etika.

Kecepatan arus informasi menyebabkan fragmentasi otoritas penafsiran agama. Jika sebelumnya otoritas ada pada ulama dan institusi formal, kini otoritas tersebut terdistribusi secara bebas kepada siapa saja yang memiliki akses teknis. Fenomena ini menimbulkan kesalahpahaman teks dan doktrin keagamaan yang seringkali mengarah pada sikap intoleran (Mukhibat et al., 2024). Program moderasi beragama dibutuhkan untuk menegaskan pentingnya verifikasi sumber, metode penafsiran kontekstual, dan pengembangan kompetensi berpikir kritis berbasis tradisi keilmuan agama. Secara empiris, kurikulum moderasi terbukti efektif menurunkan bias kognitif peserta didik terhadap kelompok berbeda (Afifah, 2025).

Selain tantangan, era modern menghadirkan peluang baru bagi pengembangan moderasi. Teknologi informasi dapat menjadi medium untuk menyebarkan nilai-nilai toleransi melalui konten edukatif, podcast, webinar lintas agama, serta kampanye digital. Sekolah dan kampus dapat memanfaatkan platform digital untuk menciptakan ruang dialog yang aman, memperluas wawasan keberagaman yang pluralistik, serta membangun jejaring kemanusiaan global (Mariyono, 2024). Moderasi beragama dalam era modern, karena itu, bukanlah sikap pasif, melainkan praksis aktif yang memanfaatkan inovasi teknologi.

Dalam konteks pendidikan, moderasi beragama di era modern menekankan tiga dimensi utama. Pertama, dimensi kognitif, yakni pengetahuan keagamaan yang kontekstual dan adaptif terhadap realitas sosial. Kedua, dimensi afektif, berupa sikap empati, toleransi, dan penghormatan terhadap perbedaan keyakinan. Ketiga, dimensi praksis, berupa kemampuan berdialog, berkolaborasi, serta menyelesaikan konflik secara damai (Ikhwan et al., 2023). Model pembelajaran berbasis pengalaman lintas komunitas semakin relevan dalam konteks urban multireligius.

Kebijakan publik juga memberikan kontribusi penting dalam mempromosikan moderasi beragama. Keputusan Menteri Agama No. 720 Tahun 2020 misalnya, mengarahkan perluasan program pelatihan moderasi bagi guru, penyuluh agama, dan tokoh masyarakat. Namun demikian, studi kebijakan menunjukkan bahwa implementasi moderasi harus mempertimbangkan karakter lokal, karena resistensi kultural dapat muncul ketika program dianggap mengurangi otentisitas ajaran (Munif, 2023). Untuk mengatasi hal tersebut, program moderasi diperlukan pendekatan partisipatif dengan melibatkan masyarakat akar rumput.

Moderasi beragama di era modern memiliki urgensi tinggi dalam menjaga kohesi sosial serta meminimalisir konflik berbasis agama. Masyarakat modern yang hidup di ruang digital tidak hanya membutuhkan pemahaman dogmatis, tetapi juga kemampuan literasi sosial, literasi media, dan literasi emosional. Kajian literatur sistematis menunjukkan bahwa tanpa internalisasi nilai moderasi, arus informasi digital dapat menimbulkan *moral panic*, polarisasi, dan delegitimasi otoritas moral (Damopolii, 2024), penguatan kapasitas kritis merupakan bagian integral dari moderasi itu sendiri.

Sebagai kesimpulan, moderasi beragama di era modern harus dipahami sebagai proses dinamis yang beradaptasi dengan perkembangan teknologi, politik identitas, dan budaya digital. Moderasi bukan sekadar sikap teologis, tetapi juga kemampuan sosial yang menuntut pemahaman terhadap struktur informasi, narasi keagamaan, serta tantangan ruang publik online. Pada titik

inilah, pendidikan berbasis moderasi beragama dapat menjadi fondasi kuat bagi terbentuknya masyarakat yang toleran, demokratis, dan inklusif. Transformasi moderasi harus dilakukan melalui pendekatan kolaboratif yang mengintegrasikan pendidikan formal, kebijakan, media digital, dan peran komunitas religius (Afifah, 2025; Mukhibat et al., 2024). Moderasi beragama menjadi relevan bukan hanya sebagai konsep normatif, tetapi juga sebagai strategi hidup dalam masyarakat plural di era modern.

Penguatan wacana moderasi beragama juga tidak terlepas dari perubahan struktur sosial masyarakat kontemporer. Transformasi demografi, urbanisasi, dan meningkatnya interaksi antar kelompok identitas memunculkan potensi gesekan antaragama maupun antarbudaya. Dalam konteks ini, moderasi menjadi instrumen sosial yang merekatkan perbedaan melalui nilai kompromi, kesediaan dialog, dan pemaknaan agama yang adaptif terhadap tantangan zaman. Penelitian menunjukkan bahwa masyarakat yang memiliki indeks keberagaman tinggi membutuhkan pedoman nilai yang mampu menjaga keseimbangan interaksi sosial agar tidak jatuh pada ketegangan identitas (Makinuddin, Zhamroni, & Sha'adah, 2022). Moderasi bukan hanya respons teologis, tetapi juga mekanisme sosial untuk mencegah fragmentasi komunitas secara massal.

Munculnya moderasi beragama juga berkaitan erat dengan evolusi pemikiran keagamaan yang semakin inklusif seiring berkembangnya studi interfaith di perguruan tinggi dan lembaga penelitian. Studi-studi tersebut memperkenalkan paradigma baru bahwa agama dapat menjadi ruang kerja sama lintas iman melalui dialog dan solidaritas sosial, terutama dalam isu kemanusiaan. Fenomena ini memperkuat argumen bahwa moderasi bukan upaya melemahkan keyakinan, tetapi strategi memperluas kontribusi agama pada harmoni sosial (Saputra, 2022). Pendekatan akademik ini memperkuat legitimasi epistemologis moderasi dalam kerangka pendidikan tinggi dan kebijakan nasional.

Perkembangan teknologi informasi menjadi salah satu pendorong utama urgensi moderasi beragama. Penyebaran pesan keagamaan yang tidak

terverifikasi melalui media sosial mempercepat radikalisasi digital, terutama pada kelompok usia muda yang rentan terhadap pesan propaganda visual. Di tengah derasnya arus informasi tersebut, literasi digital keagamaan hadir untuk menanamkan pola pikir kritis dan memperkuat etika berkomunikasi virtual. Diskursus ini menekankan bahwa moderasi beragama di era digital tidak dapat dipisahkan dari kemampuan warga memahami algoritma, bias informasi, dan narasi kebencian yang tersembunyi (Al-Afif, 2025; Tantra, 2024). Oleh sebab itu, strategi moderasi memerlukan integrasi dengan program literasi digital komprehensif.

Moderasi beragama juga muncul sebagai respons terhadap meningkatnya politik identitas. Pemanfaatan agama dalam kontestasi elektoral sering kali melahirkan polarisasi opini, delegitimasi moral, dan pembentukan kelompok eksklusif. Fenomena ini mendorong negara dan lembaga pendidikan untuk membangun narasi kontra berupa moderasi beragama sebagai stabilisator ruang publik. Dalam lingkup pendidikan formal, strategi ini diwujudkan melalui kegiatan pembelajaran kolaboratif, program lintas iman, serta kurikulum yang membahas demokrasi, HAM, dan kerukunan (Munif, 2023). Penelitian empiris menegaskan bahwa siswa yang terpapar wacana pluralisme sejak dini memiliki kecenderungan rendah terhadap sikap intoleran di kemudian hari (Albana, 2023).

Pada tataran metodologis, munculnya moderasi beragama dapat dibaca melalui pendekatan analisis budaya. Budaya lokal memiliki peran signifikan dalam menyaring paham global yang masuk melalui media dan pergerakan transnasional. Nilai-nilai kearifan lokal seperti gotong royong, musyawarah, dan rasa hormat kepada sesama menjadi fondasi sosiologis bagi praktik moderat. Dalam konteks Nusantara, kearifan lokal ini mengintegrasikan identitas religius dalam sistem nilai kebangsaan, sehingga agama dipahami sebagai pedoman hidup yang mendukung kesatuan sosial, bukan dikotomi sosial (Nurlaili, 2024; Khasanah, 2023). Pendekatan budaya inilah yang menjadikan moderasi beragama relevan dan diterima oleh masyarakat multi-etnis Indonesia.

Moderasi beragama juga muncul secara praksis melalui kebutuhan penyelesaian konflik horizontal. Beberapa wilayah di Indonesia pernah mengalami potensi gesekan berbasis agama akibat misinformasi, perbedaan ritual, maupun persaingan kelompok. Upaya rekonsiliasi sosial di wilayah tersebut menunjukkan bahwa moderasi menawarkan formula resolusi damai yang menekankan dialog, penyamaan persepsi, dan negosiasi nilai. Dengan kata lain, moderasi hadir sebagai metode penyelesaian konflik berbasis kearifan dialogis, bukan kemenangan satu kelompok atas lainnya (Fahrudin, 2024; Tantra, 2024). Kesuksesan model ini mendorong pemerintah dan lembaga pendidikan mengadopsinya sebagai paradigma sosial yang lebih luas.

Perlu dipahami pula bahwa munculnya moderasi beragama tidak dapat dilepaskan dari perubahan orientasi keagamaan global. Di tingkat internasional, organisasi keagamaan dunia mendorong wacana moderasi sebagai upaya merespons ekstremisme global dan kekerasan transnasional. Indonesia, melalui skema diplomasi budaya, memperkenalkan moderasi sebagai model Islam rahmatan lil 'alamin yang kontekstual dengan demokrasi modern. Interaksi global ini memperkaya wacana akademik dan mendorong pembentukan kurikulum keagamaan yang menekankan etika sosial, kebebasan berkeyakinan, dan dialog antarperadaban (Munif, 2023; Mahmud, 2022). Moderasi mengalami perkembangan epistemik sekaligus geopolitik.

Dalam perspektif psikologi sosial, moderasi beragama muncul karena manusia memiliki kebutuhan dasar untuk diterima dalam kelompok sosial yang aman. Ketika seseorang menggunakan agama sebagai sumber identitas eksklusif, muncul kecenderungan menolak kelompok lain. Moderasi hadir untuk menormalkan emosi sosial ini melalui penguatan empati, pengakuan perbedaan, dan keterlibatan kolektif dalam tujuan kemanusiaan. Pendidikan sikap moderat pada siswa terbukti menurunkan tingkat prasangka dan kecemasan sosial terhadap kelompok berbeda (Hamidah, 2022), sekaligus meningkatkan kemampuan resolusi konflik interpersonal (Albana, 2023).

Temuan ini memperlihatkan moderasi sebagai kebutuhan psikologis kolektif.

Secara struktural, kemunculan moderasi beragama juga berfungsi melindungi integrasi ideologis negara. Di Indonesia, sistem ideologi kebangsaan melalui Pancasila menyediakan kerangka filosofis bahwa kebebasan beragama harus sejalan dengan persatuan nasional dan penghormatan hak asasi manusia. Moderasi menjadi jembatan antara nilai spiritual dan nilai kewarganegaraan, sehingga praktik keberagamaan tetap berada dalam koridor konstitusi. Dalam konteks ini, moderasi bukan sekadar diskursus religius, tetapi instrumen kebijakan untuk memitigasi ancaman ideologi yang menggerus identitas nasional (Munif, 2023; Fahrudin, 2024).

Memperhatikan keseluruhan dinamika tersebut, dapat ditegaskan bahwa munculnya moderasi beragama merupakan respons terhadap tantangan yang bersifat multi-level: mikro (psikologis), meso (komunitas), dan makro (negara dan global). Moderasi muncul sebagai rancangan nilai yang memadukan integritas agama dengan kultur demokrasi, tanpa menghilangkan substansi spiritualitas. Sebagai suatu diskursus, ia terus berevolusi mengikuti perkembangan teknologi, perubahan politik, dan arus globalisasi. Tantangan ke depan ialah bagaimana memastikan moderasi beragama tidak berhenti sebagai slogan, tetapi bertransformasi menjadi praktik keseharian yang membentuk budaya damai, kritis, dan empatik dalam masyarakat plural (Makinuddin, Zhamroni, & Sha'adah, 2022; Saputra, 2022).

Pemahaman siswa terhadap moderasi beragama merupakan konstruksi kognitif, afektif, dan praktis yang terbentuk melalui proses sosialisasi agama, pendidikan formal, interaksi keluarga, serta paparan media. Moderasi beragama sendiri, dalam wacana kebijakan dan akademik Indonesia, merujuk pada sikap yang menyeimbangkan kesetiaan terhadap ajaran agama dengan penghormatan atas pluralitas, penolakan terhadap kekerasan, serta komitmen kebangsaan. Pemahaman ini pada tingkat siswa bukan sekadar meniru definisi akademis atau kebijakan, melainkan

bermuara pada bagaimana nilai-nilai moderat diinternalisasi dan diwujudkan dalam sikap sehari-hari di lingkungan sekolah dan masyarakat (Mahrus, 2024; Albana, 2023).

Secara konseptual, pemahaman siswa tentang moderasi beragama dapat dianalisis pada tiga ranah saling terkait: pengetahuan (knowledge), sikap (attitude), dan praktik (practice). Ranah pengetahuan mencakup pemahaman terhadap definisi moderasi, dimensi-dimensi normatifnya (misalnya toleransi, anti-kekerasan, komitmen kebangsaan, akomodasi budaya lokal), serta sumber-sumber agama yang direferensikan. Ranah sikap meliputi kecenderungan emosional dan evaluatif siswa terhadap keberagaman apakah mereka menerima, ragu, atau menolak. Ranah praktik menggambarkan tindakan konkrit seperti partisipasi dalam dialog lintas agama, penghormatan pada upacara agama lain, atau pilihan kata dan perilaku di ruang digital. Kajian empiris di tingkat sekolah menegaskan bahwa ketiga ranah ini kerap tidak seragam; siswa mungkin memahami konsep moderasi secara kognitif, tetapi praktiknya dipengaruhi oleh tekanan kelompok, norma keluarga, dan pengaruh media (Sa'idah, 2024; Darmi, 2023).

Faktor pendidikan formal khususnya peran mata pelajaran agama, PPKn, dan program pembinaan nilai di sekolah memegang peranan penting dalam membentuk pemahaman siswa. Sekolah yang mengintegrasikan materi moderasi dalam kurikulum, serta menerapkan pedagogi dialogis dan aktivitas lintas-iman, menunjukkan hasil internalisasi nilai moderasi yang lebih baik pada siswa. Penelitian implementatif menyebutkan bahwa keberhasilan integrasi nilai moderasi di sekolah ditentukan oleh kualitas guru (kompetensi pedagogis dan kompetensi moderasi), dukungan kurikulum, dan keberlanjutan program ekstrakurikuler yang bersifat inklusif (Albana, 2023; Helmawati, 2024). Dengan kata lain, bukan sekadar materi formal tetapi juga praktik sekolah (hidden curriculum) yang membentuk pemahaman siswa.

Selain institusi sekolah, keluarga dan lingkungan komunitas menjadi arena primer pembentukan pemahaman. Nilai-nilai religius yang dipraktikkan di

rumah baik berupa narasi keagamaan, keteladanan sikap toleran, maupun pola komunikasi antaranggota keluarga mempengaruhi bagaimana anak menafsirkan ajaran agama dan moderasi. Studi kasus pada madrasah dan sekolah umum menunjukkan variasi pemahaman yang erat kaitannya dengan tradisi lokal, praktik komunitas keagamaan, serta eksposur siswa pada kegiatan lintas-komunitas; siswa yang keluarga dan komunitasnya pro-dialog cenderung menginternalisasi moderasi lebih kuat dibanding siswa yang tumbuh di lingkungan eksklusif (Noor & Ikwandi, 2025; Makinuddin et al., 2022). Upaya pendidikan moderasi perlu bersifat lintas-ekosistem, melibatkan keluarga dan masyarakat sipil.

Paparan media dan ruang digital merupakan faktor kontemporer yang signifikan dalam membentuk pemahaman siswa. Media sosial memfasilitasi akses cepat terhadap beragam narasi keagamaan baik yang moderat maupun yang eksklusif sehingga ketajaman literasi digital menjadi faktor penentu apakah siswa dapat mengolah informasi secara kritis atau justru termobilisasi dalam pola radikalisasi. Literatur terkini merekomendasikan penggabungan literasi digital keagamaan dalam kurikulum moderasi agar siswa tidak hanya menerima pesan secara literal, tetapi mampu menguji kebenaran sumber, memahami konteks, dan menjaga etika komunikasi daring (Al-Afif, 2025; Tantra, 2024). Implikasi praktisnya adalah perlunya modul pembelajaran yang memadukan literasi media dengan pendidikan agama moderat.

Pembentukan pemahaman siswa juga dipengaruhi oleh pengalaman interaksi sosial sehari-hari khususnya kualitas *bridging* dan *bonding* dalam jaringan sosial mereka. Jaringan *bridging* yang luas (pertemanan lintas agama, kelas, atau ekstrakurikuler) cenderung memperkaya perspektif dan menumbuhkan empati, sedangkan jaringan *bonding* yang terlalu tertutup dapat memperkuat prasangka dan sikap eksklusif. Penelitian yang mengadopsi perspektif modal sosial menemukan korelasi positif antara kerja sama lintas-identitas di sekolah dan tingkat toleransi siswa, yang menjadi manifestasi praktis dari pemahaman moderasi (Putnam; Mahmud, 2022).

Intervensi pendidikan yang bertujuan memperluas jejaring sosial siswa dapat meningkatkan pemahaman dan praktik moderat.

Menurut perspektif metodologis dan pengukuran, studi-studi terbaru mengembangkan instrumen skala moderasi yang mengukur dimensi-dimensi seperti komitmen kebangsaan, toleransi, anti-kekerasan, dan penghormatan terhadap budaya lokal dimensi yang juga relevan untuk menilai pemahaman siswa (Sa'idah, 2024; Mahrus, 2024). Penggunaan metode campuran sering direkomendasikan: survei kuantitatif memberi gambaran distribusi pemahaman, sementara wawancara mendalam dan observasi partisipatif menjelaskan makna lokal dan praktik harian yang menjadi bukti internalisasi. Dalam konteks penelitian kualitatif, fokus pada narasi siswa, pengalaman simbolik, dan praktik sekolah memberikan wawasan kaya tentang bagaimana konsep moderasi ditafsirkan, dipertahankan, atau ditolak dalam ruang kehidupan mereka.

Analisis literatur mengungkap beberapa hambatan utama dalam pembentukan pemahaman moderasi siswa: pertama, inkonsistensi implementasi kebijakan moderasi antar sekolah dan daerah; kedua, keterbatasan kapasitas guru untuk mengajarkan moderasi secara kontekstual; ketiga, tekanan teman sebaya dan lingkungan keluarga yang konservatif; serta keempat, dominasi narasi digital yang sensasional yang mempercepat polarisasi. Studi implementatif menggarisbawahi bahwa tanpa pelatihan guru, bahan ajar yang relevan, dan dukungan kebijakan daerah, program moderasi mudah menjadi seremonial dan tidak berdampak pada transformasi pemahaman siswa (Munif, 2023; Fahrudin, 2024). Hambatan-hambatan ini menuntut strategi intervensi yang terintegrasi dan sensitif konteks lokal.

Lebih jauh, literatur juga menunjukkan bahwa pemahaman siswa terhadap moderasi tidak statis ia berubah seiring pengalaman pendidikan, paparan media, dan pergeseran identitas dalam masa remaja. Proses re-interpretasi ajaran agama menjadi dimensi penting: siswa yang dilatih membaca teks agama secara kontekstual dan kritis cenderung merumuskan pemahaman

moderat yang matang, sedangkan yang menerima tafsir literal lebih rentan menunjukkan sikap eksklusif. Pembelajaran agama yang mendorong hermeneutika kontekstual dan dialog antar-teks menjadi kunci penguatan pemahaman moderasi di kalangan siswa (Khasanah, 2023; Saputra, 2022).

Akhirnya, kajian-kajian empiris menyarankan arah penelitian yang relevan untuk skripsi kualitatif: menelusuri bagaimana siswa menarasikan sendiri makna moderasi dalam bahasa keseharian mereka; mengeksplorasi peran guru sebagai mediator nilai moderasi; menginvestigasi bagaimana ruang digital memfasilitasi atau menghambat pembentukan pemahaman; serta memetakan praktik-praktik sekolah yang efektif mereproduksi nilai moderat dalam kultur sekolah. Pendekatan kualitatif (wawancara mendalam, observasi partisipatif, studi kasus) sangat tepat untuk menangkap nuansa makna lokal di balik skor kuantitatif, sehingga rekomendasi kebijakan dapat berbasis pada pemahaman lokal yang kaya dan aplikatif (Albana, 2023; Sa'idah, 2024).

Secara ringkas, pemahaman siswa tentang moderasi beragama merupakan hasil interaksi antara pengetahuan formal, praktik sosial, konteks keluarga, paparan media, dan kualitas lingkungan sekolah. Memperkuat pemahaman tersebut mensyaratkan pendekatan pendidikan yang holistik: pengembangan bahan ajar kontekstual, pelatihan guru, integrasi literasi digital, serta penciptaan ruang interaksi lintas-identitas di sekolah. Penelitian kualitatif yang fokus pada pengalaman dan makna siswa akan memberikan kontribusi penting untuk merancang intervensi pendidikan yang efektif, berkelanjutan, dan berakar pada realitas lokal.

#### **b. Kaitan Moderasi Beragama dengan Pancasila**

Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional Indonesia memuat nilai-nilai fundamental yang menjadi acuan hidup berbangsa, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat

Indonesia. Nilai-nilai tersebut tidak hanya menjadi rumusan filosofis, tetapi juga kerangka etis yang membentuk praktik sosial dan politik publik Indonesia. Moderasi beragama yang menekankan keseimbangan, toleransi, keterbukaan, dan penolakan terhadap ekstremisme secara konseptual berimpit dan berfungsi sebagai realisasi praktis dari nilai Pancasila, terutama pada sila kedua, sila ketiga, dan sila kelima (Rohman & Nurhadi, 2021). Moderasi beragama dapat dilihat sebagai jembatan moral yang menghubungkan prinsip ideologis negara dengan kebutuhan membangun kohesi sosial dalam masyarakat plural.

Secara historis, konsensus kebangsaan yang melahirkan Pancasila merupakan hasil dialog berkelanjutan antarelite yang menyadari bahwa pluralitas budaya dan keagamaan Indonesia dapat menjadi sumber kekuatan jika dikelola dengan bijak. Oleh sebab itu, Pancasila sejak awal menuntut praktik keberagamaan yang tidak eksklusif, tidak memaksakan kebenaran tunggal, dan tidak memicu fragmentasi sosial. Moderasi beragama dalam konteks ini berfungsi sebagai norma-operasional yang menahan kecenderungan sektarianisme dan ekstremisme, serta mempromosikan dialog antarumat beragama sebagai bagian dari politik kebersamaan (Masbukin, 2023). Berdasarkan pemikiran tersebut, program moderasi beragama tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan menjaga stabilitas nasional melalui internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

Pada level kebijakan, pemerintah Indonesia sejak 2019 mengarusutamakan moderasi beragama sebagai salah satu agenda pembangunan nasional. Kementerian Agama mengembangkan modul, kerangka pelatihan, dan kebijakan pendidikan yang menempatkan moderasi sebagai alat untuk merawat konsensus kebangsaan. Pendekatan ini menjadikan moderasi bukan hanya konsep akademik, tetapi kebijakan operasional yang mengakar pada institusi pendidikan, birokrasi, dan komunitas keagamaan (Kementerian Agama RI, 2021). Implementasi kebijakan ini menunjukkan bahwa moderasi dipahami sebagai instrumen untuk menyeimbangkan hak beragama individu dengan tanggung jawab kolektif demi kepentingan bangsa.

Dalam lingkup pendidikan, relevansi keterkaitan moderasi beragama dengan Pancasila semakin terasa penting. Nilai-nilai Pancasila mengharuskan peserta didik mengembangkan etika kebangsaan, mengedepankan kesetaraan, serta menghormati perbedaan keyakinan yang berkembang di masyarakat. Integrasi moderasi ke dalam kurikulum Pendidikan Agama dan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) terbukti efektif dalam meningkatkan sikap toleransi, menurunkan kecenderungan eksklusivisme, serta meningkatkan komitmen kebangsaan peserta didik apabila disertai pendekatan dialogis dan kegiatan lintas iman (Ikhwan, Azhar, & Alfiyanto, 2023; Mukhibat et al., 2024). Pendidikan berfungsi sebagai wadah pembentukan karakter ideologis sekaligus etika keberagamaan yang sehat.

Dalam konteks era modern yang ditandai oleh transformasi digital, politik identitas, dan penetrasi arus global tantangan moderasi beragama semakin kompleks. Media sosial menghadirkan ruang baru yang memungkinkan penyebaran ujaran kebencian, misinformasi agama, hingga narasi radikal dalam durasi waktu yang singkat. Sementara itu, Pancasila melalui sila ketiga menegaskan pentingnya menjaga persatuan, sementara moderasi beragama menawarkan filter moral untuk menghadapi polarisasi digital. Penelitian menunjukkan bahwa tanpa internalisasi moderasi, nilai-nilai Pancasila berpotensi mengalami delegitimasi simbolik akibat narasi intoleran yang terorganisasi di ruang virtual (Munif, 2023; Damopolii, 2024). Karena itu, pendekatan moderasi tidak cukup normatif; perlu pula literasi digital keagamaan.

Dalam perspektif hak dan kewajiban warga negara, Pancasila menegaskan kebebasan beragama sekaligus tanggung jawab sosial untuk menghormati hak serupa pada orang lain. Moderasi beragama berfungsi menjembatani perbedaan ini dengan cara menanamkan kesadaran bahwa kebebasan beragama tidak boleh merusak keteraturan publik. Itulah sebabnya pendekatan moderasi menekankan pentingnya musyawarah, penyelesaian konflik secara damai, serta penghormatan terhadap martabat manusia. Program pelatihan moderasi beragama oleh negara berupaya menerjemahkan prinsip ini menjadi indikator praktis seperti literasi agama

kontekstual, dialog antarumat beragama, dan penolakan terhadap ujaran kebencian.

Namun demikian, implementasi moderasi beragama sebagai penegak Pancasila tidak berjalan tanpa tantangan. Risiko instrumentalisasi politik dapat menyebabkan moderasi beragama dipakai sebagai legitimasi kelompok tertentu untuk mendeligitimasi pihak oposisi. Selain itu, kesenjangan kapasitas daerah dalam memahami modul moderasi mengakibatkan kualitas implementasi yang tidak merata. Di tingkat budaya, narasi tradisionalisme keagamaan yang rigid dapat menjadi resistensi terhadap pendekatan inklusif. Ditambah lagi, media digital telah melahirkan algoritma yang memperkuat polarisasi sehingga memperlemah efek kebijakan moderasi jika tidak dibarengi narasi tandingan yang kuat (Khasanah, 2023; Munif, 2023). Karena itu, strategi moderasi harus kolaboratif, partisipatif, serta berbasis bukti.

Pada ranah sosiokultural, prinsip moderasi beragama dan nilai-nilai Pancasila bekerja dalam lingkaran reflektif. Nilai kemanusiaan adil dan beradab memperkuat etika moderasi, sementara moderasi mendorong internalisasi nilai kemanusiaan dalam interaksi lintas identitas. Demikian pula, sila keadilan sosial menemukan penerapan melalui sikap anti-diskriminasi yang merupakan inti moderasi beragama. Dalam situasi maraknya intoleransi berbasis perbedaan ritual, moderasi beragama menjadi mekanisme interkultural yang memungkinkan harmoni melalui komunikasi inklusif dan empati sosial. Jika nilai-nilai ini diabaikan, Pancasila akan kehilangan landasan praksis dalam kehidupan sehari-hari.

Moderasi beragama dan Pancasila merupakan dua entitas saling menguatkan dalam merawat konstruksi masyarakat plural Indonesia. Pancasila memberi landasan normatif bagi sikap moderat, sedangkan moderasi merupakan bentuk konkret aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam interaksi sosial, budaya, dan digital. Agar hubungan ini efektif, diperlukan sinergi antara kebijakan nasional, sistem pendidikan, peran tokoh agama lokal, dan strategi dialog publik yang responsif terhadap tantangan era modern (Afifah,

2025; Mukhibat et al., 2024). Tanpa moderasi, prinsip persatuan dan keadilan sosial kehilangan relevansi praksis; tanpa Pancasila, moderasi kehilangan legitimasi ideologisnya.

Moderasi beragama memiliki keterkaitan filosofis, yuridis, dan sosiologis dengan sila pertama Pancasila, *Ketuhanan Yang Maha Esa*, karena sila ini menegaskan bahwa bangsa Indonesia menjadikan nilai ketuhanan sebagai fondasi moral dalam kehidupan publik. Secara filosofis, sila pertama mengandung prinsip bahwa setiap manusia memiliki hak yang setara dalam beragama serta diperlakukan sebagai makhluk Tuhan yang bermartabat. Moderasi beragama hadir untuk memastikan nilai ketuhanan tidak ditafsirkan secara sempit dan eksklusif, tetapi inklusif dan dialogis, sehingga nilai-nilai transendental dapat diwujudkan dalam relasi sosial yang harmonis (Aziz, 2021). Dalam konteks substansial, nilai ketuhanan tidak hanya berkaitan dengan aspek ritual, tetapi juga pengembangan etika, rasa hormat, dan penghargaan terhadap sesama pemeluk agama.

Secara historis, para pendiri bangsa merumuskan sila pertama sebagai jawaban atas pluralitas keyakinan di Indonesia. Sila ini bukan alat untuk mendominasi, tetapi sebagai titik temu spiritual seluruh warga negara. Karena itu, moderasi beragama berfungsi sebagai mekanisme pembumian nilai ketuhanan dalam bentuk sikap toleransi, dialog lintas iman, dan kemampuan menerima perbedaan. Tanpa moderasi, sila pertama berpotensi mengalami radikalisme pemaknaan, yang dapat memunculkan klaim kebenaran tunggal dan praktik eksklusivisme keagamaan yang memecah belah (Latifah & Putri, 2022). Oleh sebab itu, moderasi menjadi alat demokratis untuk menjaga keseimbangan ekspresi beragama di tengah keberagaman masyarakat.

Dalam perspektif kebijakan, sila pertama mendorong negara untuk mengembangkan sistem hukum yang melindungi keberagaman agama dan menciptakan tatanan sosial yang lebih beradab. Pemerintah mengacu pada prinsip moderasi dalam menghadapi fenomena intoleransi, radikalisme, dan ujaran kebencian sebagai ancaman terhadap ketahanan nasional. Kebijakan

pembinaan kehidupan beragama, forum kerukunan antarumat beragama, hingga pendidikan karakter merupakan wujud operasionalisasi sila ketuhanan dalam konteks pemerintahan (Suryadinata, 2020). Negara tidak memihak agama tertentu, tetapi menjamin keseimbangan melalui perlindungan hukum yang adil.

Di lingkungan pendidikan, moderasi beragama menjadi urgensi utama untuk membentuk generasi yang memiliki literasi keagamaan inklusif. Sekolah berfungsi sebagai ruang multikultural di mana peserta didik dengan latar agama berbeda saling bertemu dan berinteraksi. Implementasi moderasi melalui kurikulum, pembiasaan, serta keteladanan guru dapat menanamkan nilai saling menghormati dan mencegah diskriminasi. Selaras dengan sila pertama yang menekankan penghormatan terhadap martabat manusia sebagai ciptaan Tuhan, tanpa memandang batas dogmatik (Fauzi & Rahman, 2023). Pendidikan agama yang humanistik diperlukan agar nilai ketuhanan tidak ditransformasikan menjadi alat legitimasi kekerasan.

Pada level sosial-budaya, moderasi beragama menjadi pengikat sosial yang mencegah fragmentasi akibat perbedaan teologis. Sila pertama mengandung nilai spiritual universal yang menegaskan bahwa dasar keberagamaan adalah kasih sayang, empati, dan keadilan. Dengan memahami agama secara komprehensif, masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh narasi identitas yang cenderung sektarian. Melalui moderasi, sila pertama dapat menjadi pedoman untuk menjaga kohesi sosial dalam keragaman etnis, bahasa, dan tradisi lokal yang melekat pada kehidupan masyarakat Indonesia modern (Sholeh, 2021). Karena itu, aktualisasi sila ketuhanan selalu terkait dengan etika sosial.

Pada ranah teologis, moderasi mengajak umat beragama untuk menempatkan ajaran agama sesuai konteks ruang dan waktu—tanpa kehilangan esensi nilai ilahinya. Penafsiran yang elastis terhadap teks suci membantu mengakomodasi keberagaman fiqh, mazhab, dan budaya. Sejalan dengan sila pertama yang menuntut penghayatan agama secara dewasa dan bertanggung jawab. Pendekatan substantif menolak tafsir ekstrem yang

menyalahkan praktik keagamaan pihak lain, karena hal tersebut bertentangan dengan nilai keadaban spiritual (Fathurrahman & Idris, 2022). Sikap yang bijak dalam memahami agama adalah representasi kematangan spiritual sebagai bangsa berketuhanan.

Selain itu, perkembangan digitalisasi informasi menghadirkan tantangan baru dalam penerapan sila pertama. Kemudahan akses terhadap informasi keagamaan yang tidak tersaring dapat memicu radikalisme daring, misinformasi agama, hingga polarisasi sosial. Moderasi beragama dapat dijadikan landasan etis untuk menggunakan media digital secara bertanggung jawab, termasuk mengelola perbedaan pendapat dalam ruang publik virtual. Penguatan literasi digital berbasis nilai ketuhanan adalah strategi untuk mencegah penyebaran ideologi ekstrem yang dapat mengancam stabilitas nasional (Hamid & Noor, 2023). Sila pertama tetap relevan dalam menghadapi perkembangan zaman.

Lebih lanjut, moderasi beragama juga berkaitan dengan pembentukan identitas nasional yang inklusif. Indonesia bukan negara sekuler yang meniadakan peran agama, tetapi juga bukan negara teokrasi yang menempatkan satu agama di atas yang lain. Moderasi menjembatani dua posisi ekstrem ini melalui prinsip keseimbangan, sehingga nilai ketuhanan hadir dalam ruang konstitusional tanpa menggerus kebebasan individu. Sila pertama adalah kontrak sosial antara negara dan warga negara untuk menjaga kehormatan agama sekaligus stabilitas publik (Rahmawati, 2024). Nilai ketuhanan dijadikan kekuatan moral, bukan alat dominasi kekuasaan.

Keterkaitan moderasi beragama dengan sila pertama Pancasila dapat dipahami sebagai upaya untuk menjaga kesucian nilai ketuhanan agar tetap relevan dengan tantangan modern, tanpa kehilangan akar budaya Nusantara. Nilai ketuhanan menjadi sumber inspirasi untuk menciptakan masyarakat yang berkeadaban, menghargai kemajemukan, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Moderasi beragama menjadi jembatan yang menghubungkan religiusitas pribadi dengan dinamika sosial, sehingga harmoni dapat terwujud secara nyata. Penerapan moderasi beragama merupakan

manifestasi praksis sila pertama dalam menghadapi era pluralitas dan globalisasi.

### **c. Pengertian Prinsip Dasar Moderasi**

Prinsip dasar moderasi beragama merupakan fondasi penting dalam membangun kehidupan sosial yang damai, adil, dan harmonis di tengah keberagaman. Moderasi pada hakikatnya adalah sikap mengambil jalan tengah, tidak berlebihan, dan tidak ekstrem dalam memahami serta mengamalkan ajaran agama. Dalam konteks masyarakat multikultural seperti Indonesia, prinsip ini menuntun umat beragama untuk mampu menyeimbangkan komitmen pada keyakinannya dengan penghormatan terhadap keberagaman agama, budaya, dan tradisi yang hidup berdampingan. Menurut Kementerian Agama Republik Indonesia (2019), prinsip dasar moderasi meliputi sikap adil, seimbang, toleran, serta menjunjung nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari. Moderasi tidak hanya bersifat teologis, melainkan juga sosial dan kultural.

Salah satu prinsip dasar moderasi adalah sikap adil. Adil dipahami sebagai kemampuan untuk menempatkan sesuatu pada tempatnya serta memberikan hak sesuai porsi yang semestinya. Dalam konteks beragama, sikap adil berarti mampu menegakkan nilai-nilai agama dengan tetap menghormati hak orang lain. Fauzi (2020) menegaskan bahwa keadilan menjadi pilar penting dalam moderasi karena tanpa keadilan, relasi antar umat beragama akan cenderung timpang dan berpotensi menimbulkan diskriminasi. Prinsip ini juga sejalan dengan Pancasila, khususnya sila kedua dan kelima, yang menekankan pada kemanusiaan dan keadilan sosial.

Prinsip dasar berikutnya adalah keseimbangan. Keseimbangan menuntut agar umat beragama tidak hanya memprioritaskan aspek ritual, tetapi juga memperhatikan dimensi sosial dan kemanusiaan. Dalam praktiknya, keseimbangan ini tercermin dari keselarasan antara pengamalan ibadah dengan peran aktif dalam menjaga persaudaraan lintas agama. Penelitian yang dilakukan oleh Anwar (2022) menunjukkan bahwa sikap seimbang

dalam kehidupan beragama mendorong terciptanya dialog konstruktif antar umat beragama, sekaligus mengurangi potensi munculnya konflik horizontal. Keseimbangan berfungsi sebagai prinsip penghubung antara iman pribadi dan realitas sosial.

Toleransi juga merupakan prinsip utama dalam moderasi. Toleransi tidak sekadar dimaknai sebagai sikap membiarkan orang lain berbeda, tetapi juga sebagai penghargaan aktif terhadap keberagaman. UNESCO (2020) menekankan bahwa toleransi adalah kunci untuk menciptakan masyarakat damai, di mana perbedaan dipandang sebagai kekayaan, bukan ancaman. Dalam konteks pendidikan, penerapan prinsip toleransi memungkinkan peserta didik belajar hidup berdampingan, saling mendukung, dan berkolaborasi meskipun berbeda keyakinan. Rahmawati (2021) menyatakan bahwa penerapan toleransi dalam sekolah menumbuhkan sikap inklusif yang dapat menjadi bekal penting bagi peserta didik dalam kehidupan bermasyarakat.

Prinsip dasar lainnya adalah menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan. Moderasi beragama di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari semangat Bhinneka Tunggal Ika, yang menegaskan bahwa perbedaan agama dan budaya adalah bagian dari identitas nasional. Kesetiaan pada konsensus nasional berupa Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan semboyan kebinekaan merupakan wujud dari komitmen kebangsaan yang moderat. Menurut Suryana (2021), moderasi yang berlandaskan nilai kebangsaan akan memperkuat persatuan nasional dan mengikis sikap eksklusif yang berpotensi memecah belah bangsa. Prinsip ini memastikan bahwa praktik keberagaman berjalan selaras dengan cita-cita kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dengan memahami prinsip dasar moderasi adil, seimbang, toleransi, dan komitmen kebangsaan dapat ditegaskan bahwa moderasi beragama adalah paradigma yang menekankan keseimbangan antara keyakinan pribadi dan penghormatan terhadap keberagaman sosial. Prinsip-prinsip ini tidak hanya relevan untuk kehidupan masyarakat luas, tetapi juga penting diterapkan

dalam dunia pendidikan. Sekolah sebagai ruang sosial yang multikultural menjadi tempat strategis untuk menanamkan nilai moderasi, sehingga peserta didik tumbuh menjadi generasi yang tidak hanya beriman, tetapi juga berkarakter toleran, adil, dan cinta tanah air.

#### **d. Indikator Moderasi Beragama**

Sikap sosial merupakan indikator penting dalam melihat keberhasilan moderasi beragama di lingkungan pendidikan. Menurut Banks, pendidikan multikultural bertujuan membentuk peserta didik yang memiliki sikap saling menghargai, toleran, dan mampu hidup berdampingan secara damai dalam masyarakat yang plural (Banks, 2008).

Dalam konteks moderasi beragama, sikap sosial tercermin melalui perilaku peserta didik yang tidak melakukan diskriminasi, tidak mengejek keyakinan orang lain, serta mampu menjalin hubungan sosial yang harmonis dengan teman yang berbeda latar belakang agama. Banks menegaskan bahwa pembentukan sikap sosial yang inklusif tidak hanya bersifat kognitif, tetapi juga afektif dan perilaku, sehingga peserta didik mampu menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Sikap sosial yang moderat mencerminkan internalisasi nilai-nilai keadilan sosial dan penghargaan terhadap perbedaan, yang merupakan tujuan utama pendidikan multikultural menurut Banks (Banks & Banks, 2019).

Proses belajar merupakan sarana utama dalam menanamkan nilai moderasi beragama. Dalam teori Banks, ini sejalan dengan dimensi *equity pedagogy*, yaitu strategi pembelajaran yang memberikan kesempatan yang setara kepada seluruh peserta didik untuk berpartisipasi dan berkembang tanpa memandang latar belakang agama maupun budaya (Banks, 2015).

Pembelajaran yang adil dan inklusif mendorong interaksi antar peserta didik yang beragam, seperti melalui diskusi kelompok heterogen, kerja sama lintas agama, dan dialog terbuka yang menghargai perbedaan pendapat. Melalui proses belajar yang demikian, peserta didik tidak hanya

memperoleh pengetahuan akademik, tetapi juga belajar memahami perspektif orang lain.

Banks menekankan bahwa proses pembelajaran yang demokratis dan partisipatif akan membentuk kesadaran multikultural peserta didik serta memperkuat sikap moderasi dalam berpikir dan bertindak (Banks, 2016). Proses belajar yang inklusif menjadi indikator penting dalam implementasi moderasi beragama di sekolah.

Lingkungan sekolah merupakan ruang sosial yang sangat berpengaruh dalam membentuk sikap dan perilaku peserta didik. Dalam teori Banks, lingkungan sekolah yang mendukung moderasi beragama harus mencerminkan nilai *empowerment school culture*, yaitu budaya sekolah yang memberikan rasa aman, keadilan, dan pengakuan terhadap keberagaman (Banks, 2008).

Lingkungan sekolah yang inklusif ditandai dengan kebijakan sekolah yang tidak diskriminatif, penyediaan fasilitas yang adil bagi seluruh peserta didik, serta terciptanya interaksi sosial yang harmonis antar warga sekolah. Banks menyatakan bahwa ketika sekolah mampu membangun budaya yang menghargai perbedaan, maka peserta didik akan lebih mudah mengembangkan identitas diri yang positif tanpa merendahkan identitas orang lain.

Berdasarkan hal tersebut, lingkungan sekolah berfungsi sebagai wadah aktualisasi nilai moderasi beragama yang mendukung terciptanya kehidupan sekolah yang rukun dan demokratis (Banks & Banks, 2019).

## 2. Tinjauan Tentang Karakter Inklusif

### a. Pengertian Karakter Inklusif

Karakter inklusif merupakan konsep penting dalam pendidikan modern yang menekankan penerimaan terhadap keberagaman, penghormatan terhadap perbedaan, dan keterlibatan aktif setiap individu dalam kehidupan sosial tanpa diskriminasi. Istilah “inklusif” berasal dari kata *inclusion* yang berarti memasukkan atau melibatkan, sehingga karakter inklusif menggambarkan sikap dan perilaku yang menerima, menghargai, serta memberikan ruang partisipasi bagi semua orang tanpa memandang latar belakang agama, suku, budaya, gender, atau kondisi sosial-ekonomi (Azizah & Rahman, 2023). Dalam konteks pendidikan, karakter inklusif menjadi landasan moral yang memungkinkan peserta didik belajar dalam suasana saling menghormati dan bekerja sama di tengah keragaman.

Karakter inklusif bukan hanya tentang toleransi pasif terhadap perbedaan, melainkan juga mencakup keterlibatan aktif dalam menciptakan lingkungan sosial yang adil dan setara. Menurut Maulana, Suharno, dan Palupijati (2024), karakter inklusif merupakan hasil dari proses pendidikan yang sistematis yang menumbuhkan empati, solidaritas, serta komitmen terhadap nilai kemanusiaan universal. Seseorang yang memiliki karakter inklusif tidak hanya mampu menerima keberagaman, tetapi juga berperan aktif dalam memperjuangkan hak-hak orang lain untuk diakui dan dihormati. Pendidikan karakter inklusif merupakan upaya membentuk individu yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga bijak secara moral dan sosial.

Dalam perspektif psikologis, karakter inklusif berkaitan erat dengan perkembangan moral dan sosial peserta didik. Piaget dan Kohlberg menekankan bahwa kemampuan untuk memahami dan menghormati perbedaan merupakan indikator kematangan moral seseorang. Dalam konteks pendidikan Indonesia yang multikultural, karakter inklusif menjadi bagian dari upaya membangun masyarakat demokratis yang berkeadilan sosial (Rachman, 2021). Sekolah berperan strategis dalam proses ini, karena

menjadi arena sosial tempat peserta didik berinteraksi dan belajar menghargai perbedaan secara nyata.

Karakter inklusif juga selaras dengan nilai-nilai Pancasila yang menekankan pada kemanusiaan yang adil dan beradab serta persatuan Indonesia. Pendidikan inklusif mengajarkan bahwa setiap peserta didik memiliki potensi dan hak yang sama untuk berkembang tanpa dibatasi oleh latar belakang sosial, budaya, atau keyakinan. Sejalan dengan pandangan UNESCO (2020) yang menegaskan bahwa pendidikan inklusif adalah hak asasi manusia yang bertujuan memastikan semua individu memiliki kesempatan yang setara dalam memperoleh pendidikan berkualitas. Dalam kerangka ini, karakter inklusif menjadi refleksi dari penghayatan nilai-nilai kemanusiaan universal yang diwujudkan dalam tindakan nyata di lingkungan pendidikan.

Menurut Nurhadi dan Santoso (2020), karakter inklusif di sekolah dapat diidentifikasi melalui perilaku siswa yang terbuka terhadap perbedaan, menghormati pendapat orang lain, serta mau bekerja sama dengan siapa pun tanpa memandang perbedaan agama atau budaya. Siswa yang memiliki karakter inklusif menunjukkan kemampuan empati tinggi, kepekaan sosial, dan sikap anti-diskriminasi. Pendidikan yang menanamkan nilai-nilai inklusif tidak hanya menghasilkan siswa yang berpengetahuan luas, tetapi juga menciptakan generasi yang siap hidup damai dalam masyarakat pluralistik.

Pembentukan karakter inklusif tidak terjadi secara instan, melainkan melalui proses pendidikan yang berkelanjutan. Guru memiliki peran vital dalam proses ini, karena melalui keteladanan dan interaksi sehari-hari, peserta didik belajar tentang makna penerimaan dan penghargaan terhadap perbedaan. Studi oleh Mahmud (2022) menunjukkan bahwa sekolah yang memiliki iklim inklusif ditandai oleh kebijakan yang adil, kegiatan lintas agama, dan komunikasi terbuka antarwarga sekolah berhasil menumbuhkan rasa saling percaya dan solidaritas sosial di kalangan siswa. Pengembangan karakter inklusif perlu diintegrasikan ke dalam seluruh aspek pendidikan,

mulai dari kurikulum, kebijakan sekolah, hingga budaya organisasi pendidikan.

Selain itu, karakter inklusif juga memiliki dimensi spiritual dan moral yang kuat. Dalam perspektif moderasi beragama, karakter inklusif berarti menjalankan ajaran agama dengan semangat kasih sayang dan menghargai sesama. Rohman dan Nurhadi (2021) menjelaskan bahwa karakter inklusif dalam beragama mengajarkan umat untuk menempatkan kemanusiaan sebagai nilai universal yang melampaui batas identitas keagamaan. Peserta didik diarahkan untuk memahami agama bukan hanya dalam kerangka ritualistik, tetapi juga sebagai sumber etika sosial yang mendorong perdamaian, toleransi, dan solidaritas antar umat manusia.

Lebih jauh lagi, pembentukan karakter inklusif berkaitan dengan teori *multicultural education* yang dikembangkan oleh Banks (2019). Dalam teorinya, Banks menekankan lima dimensi pendidikan multikultural *content integration, knowledge construction, prejudice reduction, equity pedagogy*, dan *empowering school culture*. Melalui integrasi konten yang mencerminkan keberagaman budaya, serta pedagogi yang adil dan reflektif, peserta didik belajar memahami bahwa perbedaan adalah realitas sosial yang harus dihormati, bukan dihindari. Pendidikan yang berorientasi pada pengurangan prasangka dan pemberdayaan budaya sekolah akan mendorong terbentuknya karakter inklusif di kalangan siswa.

Dalam konteks penelitian ini, karakter inklusif dipahami sebagai kualitas personal dan sosial peserta didik yang mencerminkan keterbukaan terhadap perbedaan agama, kemampuan hidup berdampingan secara damai, serta keinginan untuk berpartisipasi dalam menciptakan suasana sekolah yang harmonis. Peserta didik yang memiliki karakter inklusif menunjukkan sikap toleran, menghargai keberagaman, bersikap empatik terhadap sesama, serta berkomitmen pada nilai-nilai kebangsaan dan kemanusiaan (Lestari, 2023). Nilai-nilai ini menjadi dasar bagi penguatan moderasi beragama dalam dunia pendidikan, khususnya di sekolah yang memiliki keragaman agama

Berdasarkan hal tersebut, karakter inklusif bukan hanya tujuan pendidikan, melainkan juga sarana untuk membangun masyarakat yang damai dan berkeadilan. Pendidikan yang menanamkan nilai inklusif akan menghasilkan generasi yang mampu mengelola perbedaan sebagai kekuatan, bukan sumber konflik. Dalam dunia yang semakin plural dan dinamis, karakter inklusif menjadi kunci bagi terciptanya keharmonisan sosial serta keberlanjutan kehidupan berbangsa dan bernegara yang berlandaskan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika.

#### **b. Urgensi Pengembangan Karakter Inklusif dalam Pendidikan**

Pendidikan pada hakikatnya tidak hanya berfungsi mentransfer pengetahuan, melainkan juga membentuk karakter manusia yang beradab, toleran, dan mampu hidup berdampingan secara damai di tengah keberagaman. Dalam konteks Indonesia yang dikenal sebagai negara multikultural dan multiagama, pengembangan karakter inklusif menjadi suatu kebutuhan mendesak. Karakter inklusif berperan penting dalam menjaga kohesi sosial, memperkuat rasa kemanusiaan, serta mendorong terciptanya masyarakat yang berkeadilan dan harmonis. Menurut Sakti (2024), pendidikan di era globalisasi tidak dapat lagi berfokus semata pada aspek kognitif, melainkan harus diarahkan pada pembentukan kesadaran sosial yang menghargai perbedaan dan mengedepankan empati sebagai wujud nyata kemanusiaan.

Secara normatif, pengembangan karakter inklusif sejalan dengan cita-cita pendidikan nasional sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menegaskan bahwa tujuan pendidikan adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, serta memiliki kemampuan sosial yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Pendidikan inklusif merupakan manifestasi dari tujuan tersebut karena menekankan penghormatan terhadap martabat manusia tanpa memandang latar belakang sosial, agama, budaya, maupun kondisi fisik. Mariyono

(2024) menyatakan bahwa pendidikan inklusif bukan hanya pendekatan pedagogis, tetapi juga sebuah paradigma sosial yang mengafirmasi keadilan dan kesetaraan bagi setiap individu di ruang pendidikan.

Urgensi pengembangan karakter inklusif juga lahir dari kenyataan sosial bahwa keberagaman yang tidak dikelola dengan baik dapat memunculkan segregasi, intoleransi, dan bahkan konflik sosial di lingkungan pendidikan. Data penelitian yang dilakukan oleh Utomo (2021) menunjukkan bahwa sekolah-sekolah yang tidak menanamkan nilai-nilai inklusif lebih rentan mengalami perundungan, diskriminasi, serta pengelompokan sosial berdasarkan agama atau suku. Sebaliknya, lingkungan pendidikan yang menumbuhkan sikap inklusif terbukti mampu meningkatkan rasa saling percaya, solidaritas, dan kemampuan resolusi konflik di kalangan peserta didik.

Karakter inklusif menjadi fondasi utama dalam membangun budaya damai (*peace culture*) di sekolah. UNESCO (2020) menegaskan bahwa pendidikan yang berorientasi pada inklusi dan toleransi berperan strategis dalam mewujudkan *education for peace*, yakni proses pembelajaran yang mengajarkan penghargaan terhadap hak asasi manusia, keadilan sosial, dan perbedaan budaya. Dalam konteks ini, pendidikan tidak hanya berfungsi untuk mencetak tenaga kerja terampil, tetapi juga untuk menumbuhkan warga negara yang berperilaku etis, menghargai pluralitas, dan menolak kekerasan dalam bentuk apa pun.

Urgensi pengembangan karakter inklusif juga semakin nyata di tengah arus globalisasi dan perkembangan teknologi informasi yang mempercepat interaksi sosial lintas budaya. Di satu sisi, globalisasi membuka ruang pertemuan dan kolaborasi; namun di sisi lain, ia juga membawa tantangan baru seperti meningkatnya intoleransi digital, ujaran kebencian, serta penyebaran ideologi eksklusif di media sosial. Dalam konteks ini, sekolah harus menjadi benteng nilai yang menanamkan kemampuan berpikir kritis, empati digital, dan kesadaran kemanusiaan universal agar peserta didik

mampu berinteraksi secara etis dalam ruang publik yang majemuk (Sakti, 2024).

Selain urgensi sosial dan global, aspek psikologis juga memperkuat pentingnya pengembangan karakter inklusif. Masa remaja merupakan periode krusial dalam pembentukan identitas sosial, di mana individu mulai mencari pengakuan diri dan kelompok. Pendidikan yang berfokus pada pengembangan nilai-nilai inklusif dapat membantu peserta didik memahami bahwa identitas pribadi tidak harus dibangun di atas penolakan terhadap yang berbeda. Menurut penelitian *Implementation of Character-Building Education in Inclusive Schools (2023)*, sekolah yang menerapkan program pendidikan karakter berbasis inklusi menunjukkan peningkatan signifikan dalam kemampuan empati dan kerja sama siswa lintas agama serta penurunan tingkat konflik antar kelompok di sekolah.

Urgensi lainnya juga bersifat struktural dan berkaitan dengan peningkatan kualitas sistem pendidikan itu sendiri. Pendidikan yang menumbuhkan karakter inklusif terbukti meningkatkan iklim belajar yang positif, rasa aman psikologis siswa, serta produktivitas guru dalam melaksanakan pembelajaran. *The Role of Character Education in Supporting Transformative Education (2025)* menunjukkan bahwa sekolah-sekolah yang berorientasi pada inklusivitas memiliki tingkat keterlibatan siswa yang lebih tinggi, partisipasi komunitas yang lebih kuat, serta keberhasilan akademik yang lebih stabil dibanding sekolah dengan pola interaksi eksklusif. Membuktikan bahwa pengembangan karakter inklusif berkontribusi langsung terhadap mutu pendidikan.

Dalam kerangka kebijakan nasional, urgensi karakter inklusif juga berkaitan dengan implementasi Profil Pelajar Pancasila yang dikembangkan dalam Kurikulum Merdeka. Salah satu dimensi utama dalam profil tersebut adalah *berkebinekaan global*, yang menekankan pada sikap menghargai perbedaan, gotong royong, serta keadilan sosial. Penguatan karakter inklusif menjadi bagian integral dari misi pemerintah untuk membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki kepekaan sosial dan

moral. Mariyono (2024) menegaskan bahwa pembelajaran multikultural dan karakter inklusif merupakan inti dari pendidikan yang relevan di abad ke-21 karena keduanya membekali siswa dengan kemampuan adaptasi dan empati yang diperlukan dalam masyarakat global.

Lebih jauh lagi, urgensi pengembangan karakter inklusif memiliki dimensi spiritual dan moral yang dalam. Dalam perspektif moderasi beragama, karakter inklusif mencerminkan ajaran universal dari setiap agama tentang kasih sayang, persaudaraan, dan penghormatan terhadap sesama manusia. Rohman dan Nurhadi (2021) menjelaskan bahwa karakter inklusif dalam pendidikan merupakan manifestasi nyata dari moderasi beragama, karena keduanya menolak ekstremisme dan menumbuhkan keseimbangan antara keyakinan pribadi dengan penghormatan terhadap perbedaan. Pengembangan karakter inklusif bukan hanya strategi sosial, tetapi juga jalan spiritual menuju kehidupan yang harmonis dan berkeadaban.

Dalam praktiknya, urgensi karakter inklusif menuntut reorientasi pendekatan pembelajaran di sekolah. Guru sebagai agen utama perubahan harus memiliki kompetensi pedagogis yang sensitif terhadap keragaman, kemampuan komunikasi lintas budaya, serta kesadaran reflektif dalam mengelola perbedaan di kelas. Penelitian oleh Mahmud (2022) menunjukkan bahwa guru yang menerapkan pendekatan inklusif, seperti pembelajaran berbasis dialog dan kerja kelompok heterogen, berhasil meningkatkan interaksi sosial positif antar siswa dan memperkuat solidaritas lintas agama. Investasi dalam pelatihan guru menjadi bagian penting dalam mendukung pengembangan karakter inklusif secara berkelanjutan.

Urgensi pengembangan karakter inklusif juga dapat dilihat dari perspektif kebijakan publik. Pemerintah daerah dan lembaga pendidikan perlu membangun kolaborasi dengan masyarakat sipil, lembaga keagamaan, serta organisasi non-pemerintah untuk memperluas jangkauan pendidikan inklusif. Menurut Sakti (2024), keberhasilan pendidikan karakter inklusif

tidak hanya bergantung pada kurikulum, tetapi juga pada dukungan ekosistem sosial yang melibatkan keluarga, masyarakat, dan negara. Sinergi ini memastikan bahwa nilai-nilai inklusif yang ditanamkan di sekolah juga diinternalisasi dalam kehidupan sosial peserta didik di luar sekolah.

Dalam konteks pendidikan abad ke-21, urgensi karakter inklusif semakin diperkuat oleh kebutuhan akan *global citizenship education*, yaitu pendidikan yang menumbuhkan kesadaran global, empati lintas budaya, dan komitmen terhadap keadilan sosial. UNESCO (2020) menggarisbawahi bahwa pembelajaran yang berorientasi pada kewarganegaraan global hanya dapat efektif jika dibangun di atas fondasi nilai-nilai inklusif yang kuat. Artinya, siswa tidak hanya harus memahami dunia secara global, tetapi juga belajar menghormati keberagaman di tingkat lokal sebagai bentuk konkret praktik kewarganegaraan yang bertanggung jawab.

Urgensi pengembangan karakter inklusif dalam pendidikan bersifat multidimensional: sosial, psikologis, moral, dan struktural. Ia menjadi kunci bagi terbentuknya generasi muda yang mampu hidup damai dalam keberagaman, berpikir kritis terhadap intoleransi, dan berpartisipasi aktif dalam membangun masyarakat yang adil serta beradab. Pendidikan yang berlandaskan karakter inklusif bukan hanya investasi jangka pendek dalam pencapaian akademik, tetapi investasi jangka panjang bagi ketahanan sosial bangsa. Sebagaimana ditegaskan oleh *The Role of Character Education in Supporting Transformative Education (2025)*, karakter inklusif adalah jantung dari transformasi pendidikan yang berorientasi pada kemanusiaan.

### **c. Dimensi Karakter Inklusif**

Dalam konteks pendidikan yang semakin kompleks dan majemuk, pengembangan karakter inklusif menjadi kebutuhan mendasar bagi peserta didik agar mampu hidup berdampingan secara damai, saling menghormati, serta menghargai perbedaan sosial, budaya, dan agama. Karakter inklusif menuntut kemampuan berpikir terbuka, empati sosial, toleransi, dan partisipasi dalam interaksi sosial yang setara. Salah satu teori yang

memberikan fondasi ilmiah yang kuat dalam memahami pembentukan karakter inklusif adalah teori Modal Sosial (*Social Capital Theory*) yang dikembangkan oleh Robert D. Putnam (2000).

Putnam mendefinisikan modal sosial sebagai jaringan hubungan sosial, norma, dan kepercayaan yang memfasilitasi koordinasi dan kerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Modal sosial bukan hanya sumber daya sosial, tetapi juga mekanisme moral yang mengikat masyarakat dalam nilai kepercayaan, solidaritas, dan tanggung jawab bersama. Dalam kerangka ini, pembentukan karakter inklusif dapat dijelaskan melalui dua dimensi utama modal sosial, yakni *bonding social capital* dan *bridging social capital*. Kedua dimensi tersebut menjelaskan bagaimana hubungan sosial yang kuat di tingkat individu maupun antar kelompok dapat menumbuhkan sikap empatik, keterbukaan berpikir, serta kemampuan bekerja sama lintas perbedaan (Putnam, 2000; Lestari, 2023).

*Bonding social capital* merujuk pada jaringan sosial yang terjalin erat di antara individu atau kelompok yang memiliki kesamaan identitas, seperti agama, etnis, atau status sosial. Hubungan ini ditandai oleh tingkat kepercayaan dan rasa solidaritas yang tinggi. Putnam (2000) menjelaskan bahwa *bonding capital* berfungsi untuk memperkuat dukungan internal, memperkokoh ikatan emosional, dan menumbuhkan rasa kepedulian terhadap sesama anggota kelompok. Dalam konteks karakter inklusif, *bonding capital* menjadi landasan bagi tumbuhnya empati sosial, yakni kemampuan untuk memahami, merasakan, dan merespons kondisi orang lain dengan penuh kepedulian. Dalam konteks dimensi karakter inklusif, indikator pertama

#### 1. Keterbukaan terhadap Perbedaan

Keterbukaan terhadap perbedaan merupakan kemampuan individu untuk menerima dan menghargai keragaman latar belakang sosial, budaya, maupun agama yang ada di lingkungannya. Putnam menegaskan bahwa *bridging social capital* bersifat *outward looking* atau berorientasi keluar serta menghubungkan orang-orang dari berbagai pembelahan sosial yang

berbeda. Ini menunjukkan bahwa jaringan sosial yang inklusif akan berkembang ketika peserta didik membuka diri terhadap keberagaman teman sekelasnya tanpa membedakan suku, agama, budaya, status ekonomi, maupun kemampuan akademik. Dalam konteks sekolah, siswa yang menunjukkan karakter inklusif akan dengan senang hati belajar bersama teman yang memiliki perbedaan karakter dan preferensi, saling bertukar pengalaman, serta berkolaborasi dalam kelompok heterogen sebagai bentuk penghargaan terhadap pluralitas.

## 2. Empati dan Kepedulian Sosial

Empati dan kepedulian sosial mencerminkan kemampuan siswa untuk memahami kondisi emosional orang lain serta bersedia memberikan bantuan tanpa pamrih. Putnam menjelaskan bahwa *bridging social capital* menghasilkan identitas sosial yang lebih luas serta memperkuat hubungan timbal balik, berbeda dengan *bonding social capital* yang cenderung menekankan solidaritas dalam lingkup yang sempit. Hal ini bermakna bahwa karakter inklusif terbentuk melalui kepedulian yang melampaui batas kelompok pertemanan inti. Di lingkungan sekolah, siswa dengan empati tinggi akan menunjukkan sikap peduli terhadap teman yang kesulitan dalam pembelajaran, mengalami tekanan psikologis, atau terisolasi akibat perbedaan tertentu. Mereka tidak hanya berorientasi pada kelompok sendiri, tetapi menjangkau teman lain sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai kemanusiaan.

## 3. Komunikasi Inklusif

Komunikasi inklusif merupakan praktik berinteraksi secara terbuka dengan semua orang, termasuk mereka yang berada di luar lingkaran pertemanan dekat. Granovetter mengemukakan bahwa *weak ties* atau hubungan dengan kenalan jauh justru lebih berharga dalam memperluas jaringan sosial dan peluang, dibandingkan *strong ties* yang hanya berfokus pada hubungan dekat. Dalam lingkungan sekolah, siswa dengan komunikasi inklusif berani menyapa teman dari kelas lain, membangun pertemanan lintas kelompok, serta mampu menyampaikan pendapat tanpa menyinggung pihak lain.

Komunikasi yang inklusif ini menciptakan suasana kelas yang kondusif, mengurangi stereotip, dan memperluas kapasitas sosial siswa dalam membangun hubungan positif yang sehat dalam budaya heterogen.

#### 4. Partisipasi dalam Kegiatan Keberagaman

Partisipasi dalam kegiatan keberagaman menunjukkan tingkat keterlibatan siswa dalam aktivitas yang melibatkan berbagai kelompok sosial, budaya, dan agama. Putnam menegaskan bahwa *bridging social capital* mampu membentuk identitas yang lebih luas dan bersifat kolektif, sementara *bonding social capital* memperkuat identitas yang lebih sempit. Dalam konteks pendidikan, siswa dengan karakter inklusif aktif mengikuti kegiatan sekolah seperti perayaan hari besar nasional, pentas seni lintas budaya, diskusi toleransi, atau kegiatan keagamaan bersama. Keterlibatan tersebut membantu memperluas wawasan, menumbuhkan rasa memiliki terhadap komunitas, dan membangun solidaritas antarindividu dari latar belakang berbeda. Partisipasi aktif ini juga memperkuat nilai persatuan, menghormati keberagaman, serta mencegah munculnya segregasi sosial di lingkungan sekolah.

Berdasarkan uraian empat indikator sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa karakter inklusif pada peserta didik merupakan konstruksi sikap dan perilaku yang tercermin melalui kemampuan menerima dan menghargai keberagaman, menunjukkan empati serta kepedulian sosial, membangun komunikasi yang terbuka dan tidak eksklusif, serta berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan yang melibatkan lintas kelompok sosial, budaya, dan agama. Keempat indikator ini saling melengkapi dalam membentuk identitas sosial yang lebih luas dan berorientasi pada rasa kebersamaan, sehingga mampu menciptakan lingkungan sekolah yang harmonis, demokratis, dan bebas dari praktik diskriminasi. Karakter inklusif tidak hanya berfungsi sebagai aspek personal, tetapi juga sebagai modal sosial yang mendukung terwujudnya interaksi sosial yang sehat dan kohesif dalam konteks pendidikan.

Empati sosial terbentuk melalui pengalaman interaksi yang intim dan penuh makna di lingkungan sosial. Ketika individu terbiasa berinteraksi dalam suasana saling percaya dan menghormati, mereka mengembangkan sensitivitas terhadap perasaan dan kebutuhan orang lain. Hasil penelitian oleh Junaedi, Nasikhin, Hasanah, dan Hassan (2023) menunjukkan bahwa hubungan sosial berbasis kepercayaan dalam kelompok belajar meningkatkan perilaku prososial dan mengurangi sikap eksklusif di kalangan siswa. Demikian pula, Mahmud (2022) menemukan bahwa pembelajaran kolaboratif di sekolah-sekolah multikultural mampu menumbuhkan empati lintas identitas agama dan budaya karena interaksi tersebut memupuk rasa saling memahami dan menghargai.

Dalam perspektif pendidikan, bonding capital dapat dilihat sebagai proses internalisasi nilai kemanusiaan universal melalui hubungan sosial yang penuh kasih. Guru dan sekolah memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang menumbuhkan keakraban dan solidaritas di antara peserta didik. Ketika empati sosial menjadi budaya kelas, peserta didik tidak hanya menghindari diskriminasi tetapi juga aktif menunjukkan kepedulian terhadap teman yang berbeda latar belakang. *Bonding social capital* tidak hanya memperkuat kohesi sosial internal, tetapi juga menjadi fondasi moral bagi pengembangan karakter inklusif yang berorientasi pada kemanusiaan (Lestari, 2023).

Bridging Social Capital dan Ciri Keterbukaan, Toleransi, serta Kerja Sama Lintas Perbedaan

Jika bonding capital menekankan solidaritas internal, maka bridging social capital berfokus pada jembatan sosial yang menghubungkan kelompok-kelompok berbeda dalam masyarakat. Putnam (2000) menyebutnya sebagai jaringan “outward looking” yang memperluas perspektif individu terhadap dunia sosial yang lebih luas. *Bridging capital* mempertemukan orang dari berbagai latar belakang budaya, agama, atau status sosial untuk berkolaborasi berdasarkan nilai-nilai universal seperti keadilan, saling menghargai, dan kesetaraan. Dalam konteks karakter inklusif, *bridging*

*capital* menjadi basis bagi tumbuhnya keterbukaan berpikir, toleransi, dan kemampuan bekerja sama lintas perbedaan.

Keterbukaan berpikir merupakan kemampuan individu untuk menerima pandangan baru, menimbang perspektif yang berbeda, dan menghargai kebenaran yang bersifat plural. Sekolah yang menumbuhkan *bridging capital* memberi ruang bagi peserta didik untuk berinteraksi dengan teman-teman dari latar belakang berbeda melalui diskusi, proyek kolaboratif, maupun kegiatan sosial lintas budaya. Maulana, Suharno, dan Palupijati (2024) menegaskan bahwa keterbukaan berpikir tumbuh secara signifikan ketika siswa berpartisipasi dalam pembelajaran yang menekankan kerja sama antar kelompok beragam, karena mereka belajar untuk menilai ide tanpa bias dan menghargai pandangan alternatif.

Selain keterbukaan berpikir, *bridging social capital* juga menumbuhkan toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan. Ketika individu terlibat dalam interaksi lintas kelompok yang dilandasi rasa saling percaya, mereka cenderung mengembangkan sikap menghargai perbedaan sebagai bagian alami dari kehidupan sosial. Lestari (2023) menemukan bahwa kegiatan lintas sekolah dengan tema keberagaman budaya berhasil meningkatkan tingkat toleransi siswa terhadap teman yang berbeda keyakinan dan etnis. Hal ini membuktikan bahwa *bridging capital* tidak hanya mendorong penerimaan terhadap perbedaan, tetapi juga menciptakan solidaritas lintas identitas yang menjadi ciri masyarakat demokratis.

Lebih jauh lagi, *bridging social capital* menjadi dasar bagi kemampuan bekerja sama lintas perbedaan. Putnam (2000) menegaskan bahwa keberhasilan kolektif dalam masyarakat modern bergantung pada kapasitas warganya untuk berkolaborasi dengan orang yang berbeda nilai, latar sosial, dan cara pandang. Sekolah yang menerapkan pembelajaran kolaboratif heterogen membuktikan hal ini. Studi Mahmud (2022) menunjukkan bahwa kerja kelompok lintas agama dan budaya di sekolah meningkatkan kemampuan komunikasi, negosiasi, serta rasa saling menghormati di antara peserta didik. Kolaborasi lintas perbedaan menjadi ruang nyata di mana

nilai-nilai karakter inklusif seperti keadilan, empati, dan kesetaraan dipraktikkan secara langsung.

### **3. Tinjauan Tentang Nilai Nilai Toleransi dalam Pendidikan**

#### **a. Konsep toleransi dalam perspektif pendidikan multikultural**

Toleransi dalam ranah pendidikan merupakan kapasitas sosial-kultural yang memungkinkan individu hidup bersama dalam perbedaan tanpa mereduksi martabat pihak lain. Dalam perspektif pendidikan multikultural, toleransi dipahami bukan sekadar sikap pasif menerima perbedaan, melainkan sebuah kecakapan yang melibatkan aspek kognitif (pemahaman tentang keragaman dan hak asasi), afektif (empati dan penghargaan), serta konatif (tindakan nyata yang menghormati dan melindungi hak pihak lain). Pendidikan multikultural menempatkan sekolah sebagai arena pendidikan dan laboratorium sosial di mana nilai-nilai toleransi dikonstruksi melalui kurikulum, praktik pedagogis, kultur sekolah, dan kebijakan kelembagaan sehingga peserta didik mengalami perjumpaan yang bermakna dengan keberagaman (Maulana, Palupijati, & Suharno, 2024). Pendidikan multikultural merupakan proses untuk mengembangkan kemampuan dan pemahaman individu agar dapat menghargai pluralitas dan heterogenitasnya di lingkungan tempat tinggal (sakti 2023) Penelitian-penelitian dari konteks Indonesia menegaskan bahwa ketika aspek-aspek ini diintegrasikan secara sistematis dalam praktik pembelajaran, terjadi perubahan sikap dan perilaku yang mendekatkan peserta didik pada praktik toleran yang nyata.

Kerangka teoritis yang relevan untuk memahami proses pembentukan toleransi meliputi teori kontak antar-kelompok (Allport, 1954) dan teori identitas sosial (Tajfel & Turner, 1979). Allport menekankan bahwa kontak antar-grup efektif mengurangi prasangka bila berlangsung dalam kondisi setara, berorientasi tujuan bersama, memberi kesempatan kerja sama, dan didukung oleh otoritas institusional. Dalam setting sekolah, kondisi-kondisi tersebut dapat diwujudkan melalui proyek kolaboratif lintas-agama dan lintas-budaya serta kegiatan pembelajaran berbasis pengalaman yang disusun secara sengaja. Namun, bukti lapangan di banyak sekolah Indonesia

menunjukkan bahwa kontak sehari-hari tanpa struktur pedagogis dan dukungan kebijakan dapat berisiko mereproduksi stereotip. Pendidikan multikultural harus mendesain pengalaman kontak agar bersifat reflektif dan terarah, bukan sekadar kontak permukaan (Allport, 1954; Junaedi, Nasikhin, Hasanah, & Hassan, 2023). Studi kualitatif di SD dan SMA di Indonesia memperlihatkan bahwa integrasi nilai multikultural ke dalam pembelajaran agama maupun mata pelajaran lain mampu menciptakan suasana yang kondusif bagi pembentukan karakter toleransi apabila praktik tersebut konsisten dan didukung oleh kebijakan sekolah serta kapasitas guru.

Pendidikan multikultural menawarkan dimensi operasional yang dapat diimplementasikan di sekolah: integrasi konten yang merepresentasikan berbagai kelompok budaya/agama ke dalam kurikulum, pedagogi dialogis dan reflektif, praktik pembelajaran kolaboratif yang menekankan tujuan bersama, serta pembangunan kultur sekolah yang adil dan menghargai keberagaman. Kajian-kajian empiris dari jurnal-jurnal Indonesia menunjukkan bahwa mata pelajaran seperti sejarah, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), serta Pendidikan Agama dapat menjadi wahana strategis untuk menanamkan nilai toleransi apabila deskripsi sejarah, studi kasus lokal, dan kegiatan proyek lintas-komunitas dimanfaatkan secara kontekstual (Santosa, Maulana, & Djono, 2024; hasil penelitian integrasi PAI di SD menunjukkan dampak positif pada kerukunan dan suasana belajar yang kondusif). Hal ini menegaskan bahwa multimodalitas pendekatan menggabungkan kognisi, afeksi, dan aksi lebih efektif dibandingkan pendekatan yang hanya mengandalkan penyampaian teori. Perspektif pendidikan Multikultur, memandang pendidikan sebagai ruang transformasi budaya yang membongkar praktik-praktik diskriminatif dalam proses pendidikan. (adha 2013)

Dari sisi implementasi, penelitian-penelitian lokal menyoroti faktor-faktor pendukung dan penghambat pendidikan toleransi berbasis multikultural. Faktor pendukung meliputi komitmen pimpinan sekolah, pelatihan guru mengenai pedagogi multikultural, tersedianya bahan ajar yang representatif, serta keterlibatan komunitas dan tokoh agama setempat. Sebaliknya,

hambatan yang konsisten ditemukan adalah keterbatasan sumber daya bahan ajar kontekstual, kurangnya pelatihan guru, resistensi budaya lokal yang konservatif, serta inkonsistensi kebijakan antara tingkat nasional dan daerah sehingga inisiatif sekolah kerap menjadi parsial atau seremonial ([garuda.kemdikbud.go.id](http://garuda.kemdikbud.go.id); jurnal-jurnal kampus Indonesia). Studi kasus di berbagai sekolah menengah dan madrasah di Indonesia menunjukkan bahwa tanpa sinergi antara kurikulum formal dan praktik informal (hidden curriculum), perubahan sikap toleran sulit dipertahankan. Intervensi yang bersifat multipihak dan berkelanjutan dianjurkan.

Dalam praktik pedagogis, metode pembelajaran yang direkomendasikan meliputi experiential learning, diskusi terstruktur antar-groups, proyek layanan masyarakat bersama, analisis kritis sumber sejarah, dan simulasi dialog antar-kepercayaan. Penelitian di tingkat SMA dan sekolah dasar Indonesia menunjukkan bahwa penggabungan kegiatan-kegiatan tersebut dengan penguatan literasi agama dan kewarganegaraan menghasilkan peningkatan empati, kemampuan resolusi konflik, dan perilaku inklusif pada siswa (Junaedi et al., 2023). Kajian khusus pada pembelajaran sejarah di SMA juga menemukan bahwa penggunaan materi lokal yang menonjolkan kisah kerjasama lintas-kelompok dapat meningkatkan apresiasi terhadap pluralitas sejarah lokal dan nasional, sehingga memperkuat identitas kebangsaan yang inklusif.

Aspek evaluasi dan penelitian mengenai toleransi di sekolah memerlukan instrumen yang mampu menangkap dimensi pengetahuan, sikap, dan praktik. Penelitian kualitatif menawarkan kedalaman melalui narasi dan cerita pengalaman guru, siswa, dan kepala sekolah, sementara data kuantitatif dapat memberikan gambaran pola lebih luas. Kombinasi wawancara mendalam, observasi partisipatif, analisis dokumen kurikulum/sekolah, serta survei skala sikap dianjurkan untuk meningkatkan kredibilitas dan transferabilitas temuan. Berbagai studi Indonesia yang mengadopsi desain campuran (mixed methods) berhasil memperlihatkan korelasi antara praktik pedagogis multikultural yang intensif dan peningkatan indikator toleransi pada peserta didik, namun studi kualitatif

tetap penting untuk memahami mekanisme lokal yang tidak tampak oleh statistik saja.

Konteks kebijakan lokal berperan sebagai mediator penting yang menentukan keberlangsungan praktik multikultural di sekolah. Studi tentang kebijakan inklusif di beberapa kota Indonesia mengindikasikan bahwa peraturan daerah yang pro-inklusi, program pendidikan publik untuk toleransi, serta kolaborasi antara dinas pendidikan dan organisasi masyarakat sipil dapat memperkuat efektivitas intervensi pendidikan di tingkat sekolah. Tanpa dukungan kebijakan makro dan kepemimpinan lokal, inisiatif sekolah cenderung menghadapi hambatan sumber daya dan legitimasi sehingga dampaknya menjadi terbatas (Anas, Saraswati, Ikhsan, & Fiaji, 2025). Rekomendasi kebijakan harus menekankan pelatihan guru, penyediaan bahan ajar lokal yang representatif, serta mekanisme monitoring dan evaluasi yang sensitif terhadap konteks kultural setempat.

Secara konseptual, landasan ini memadukan teori psikologi sosial (teori kontak dan teori identitas sosial), kerangka pendidikan multikultural (konten, konstruksi pengetahuan, pedagogi, dan kultur sekolah), serta kajian kebijakan publik. Perpaduan kerangka tersebut memungkinkan pendekatan penelitian kualitatif untuk menangkap dinamika multilevel: level mikro berupa pengalaman subjektif peserta didik dan guru, level meso berupa praktik sekolah dan kultur organisasi, serta level makro berupa kebijakan daerah/nasional dan wacana publik. Pendekatan fenomenologis, etnografi sekolah, atau studi kasus interpretatif direkomendasikan untuk mendalami makna toleransi di konteks lokal dan bagaimana praktik pendidikan multikultural dioperasionalisasikan dalam kehidupan sekolah sehari-hari.

Fokus pada narasi pengalaman peserta didik, praktik guru, dan dokumentasi kebijakan sekolah akan mengungkap proses konstruksi sikap toleran yang seringkali bersifat kontekstual dan historis. Temuan yang dihasilkan tidak hanya berharga untuk pengembangan teori, tetapi juga memiliki implikasi praktis bagi guru, pengelola sekolah, dan pembuat kebijakan yang berupaya menjadikan pendidikan sebagai agen pembentuk kehidupan bersama yang

damai dan inklusif. Pendidikan multikultural yang disertai komitmen jangka panjang, dukungan kebijakan, serta keterlibatan komunitas diyakini dapat mengubah toleransi dari sekadar konsep menjadi praktik kewargaan yang hidup di lingkungan sekolah.

#### **b. Peran Pendidikan dalam Menumbuhkan Sikap Toleransi Peserta Didik**

Pendidikan memiliki peran yang sangat strategis dalam membentuk karakter peserta didik, termasuk dalam menumbuhkan sikap toleransi. Sebagai proses yang tidak hanya mentransfer pengetahuan, pendidikan juga berfungsi menanamkan nilai, moral, dan keterampilan sosial yang dibutuhkan untuk hidup dalam masyarakat yang majemuk. Dalam konteks Indonesia yang multikultural, pendidikan tidak dapat dilepaskan dari upaya menyiapkan generasi muda agar mampu menerima perbedaan dan hidup harmonis dengan latar belakang agama, budaya, maupun etnis yang beragam. Menurut Azizah (2020), pendidikan berfungsi sebagai wahana pembudayaan dan pewarisan nilai yang berorientasi pada pembentukan manusia berkarakter inklusif, terbuka, serta mampu menghargai pluralitas.

Sikap toleransi yang tumbuh melalui pendidikan memiliki landasan filosofis yang kuat. Pendidikan kewarganegaraan di Indonesia harus mampu melihat konsep bahwa Indonesia sebagai negara yang memiliki keanekaragaman yang sangat banyak, diharapkan dapat memberikan pengertian atau pemahaman kepada warga masyarakat agar dapat memahami perbedaan tersebut terhadap satu dengan yang lainnya (Adha 2015) Konsep Bhinneka Tunggal Ika mengajarkan bahwa perbedaan adalah bagian dari kekuatan bangsa yang harus dirawat, bukan dihindari. Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal menjadi ruang strategis untuk membangun kebiasaan hidup bersama dalam keberagaman. Proses pembelajaran yang dirancang oleh guru dapat memberikan pengalaman nyata bagi peserta didik untuk memahami nilai saling menghargai dan bekerja sama, meskipun mereka memiliki keyakinan yang berbeda. Hasil penelitian Pratiwi (2021) menunjukkan bahwa integrasi nilai-nilai toleransi dalam kurikulum sekolah

berkontribusi signifikan terhadap sikap inklusif peserta didik dalam pergaulan sehari-hari.

Dalam perspektif pedagogis, penumbuhan sikap toleransi dapat dilakukan melalui pendekatan pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural menekankan penghargaan terhadap perbedaan budaya, agama, dan etnis yang ada dalam masyarakat. Banks (2019) menyatakan bahwa pendidikan multikultural bukan hanya sekadar mengenalkan keragaman, tetapi juga membangun pemahaman kritis, empati, serta kesadaran untuk mengurangi diskriminasi dalam kehidupan sosial. Penerapan pendidikan multikultural di sekolah akan membiasakan peserta didik untuk menerima perbedaan, berdialog, serta menumbuhkan sikap keterbukaan terhadap perspektif orang lain.

Selain itu, pendidikan karakter juga memiliki peran penting dalam membangun sikap toleransi. Pendidikan karakter tidak hanya menekankan aspek kognitif, tetapi juga pembentukan sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan. Menurut Rachman (2021), pendidikan karakter di sekolah yang dirancang melalui pembiasaan, keteladanan, serta kegiatan ekstrakurikuler terbukti efektif dalam menanamkan nilai toleransi. Hal ini menunjukkan bahwa proses pendidikan yang menyentuh aspek afektif mampu menginternalisasi nilai-nilai toleransi lebih mendalam dibandingkan dengan pembelajaran kognitif semata. Selama ini, pendidikan informal terutama dalam lingkungan keluarga belum memberikan kontribusi berarti dalam mendukung pencapaian kompetensi dan pembentukan karakter peserta didik. Kesibukan dan aktivitas kerja orang tua yang relatif tinggi, kurangnya pemahaman orang tua dalam mendidik anak di lingkungan keluarga, pengaruh pergaulan di lingkungan sekitar, dan pengaruh media elektronik ditengarai bisa berpengaruh negatif terhadap perkembangan dan pencapaian hasil belajar peserta didik. Adha(2012).

Lingkungan sekolah juga menjadi faktor penting dalam menumbuhkan sikap toleransi. Hubungan antar peserta didik dari berbagai latar belakang agama menjadi ruang interaksi sosial yang memunculkan dinamika

kebersamaan. Jika sekolah mampu menciptakan iklim yang inklusif, maka peserta didik akan terbiasa menerima perbedaan tanpa merasa terancam. Studi oleh Mahmud (2022) menegaskan bahwa interaksi sosial di sekolah yang didukung oleh kebijakan inklusif mampu memperkuat kerukunan antar umat beragama. Pendidikan di sekolah tidak hanya terbatas pada kegiatan belajar mengajar di kelas, tetapi juga meliputi pengalaman sosial yang membentuk kepribadian siswa.

Dalam konteks global, UNESCO (2019) menekankan bahwa pendidikan untuk perdamaian (*education for peace*) harus menjadi bagian integral dari kurikulum di negara multikultural. Pendidikan yang menanamkan nilai toleransi diyakini dapat mengurangi potensi konflik dan memperkuat kohesi sosial. Menumbuhkan sikap toleransi melalui pendidikan bukan hanya menjadi kebutuhan bangsa Indonesia, melainkan juga bagian dari upaya mewujudkan perdamaian dunia.

Secara keseluruhan, landasan teori tentang peran pendidikan dalam menumbuhkan sikap toleransi peserta didik dapat disimpulkan melalui tiga dimensi utama. Pertama, pendidikan sebagai sarana pewarisan nilai yang membiasakan peserta didik untuk menerima perbedaan. Kedua, pendidikan multikultural dan pendidikan karakter sebagai pendekatan strategis yang dapat digunakan sekolah untuk menanamkan toleransi. Ketiga, interaksi sosial di lingkungan sekolah yang inklusif menjadi ruang nyata di mana nilai toleransi dipraktikkan oleh peserta didik. Dengan pemahaman ini, dapat ditegaskan bahwa pendidikan memegang peran sentral dalam membentuk generasi yang mampu hidup berdampingan secara damai di tengah keragaman masyarakat.

### **c. Implementasi Nilai Toleransi dalam Kegiatan Belajar dan Kehidupan Sekolah**

Implementasi nilai toleransi dalam kegiatan belajar dan kehidupan sekolah merupakan aspek penting dalam membangun suasana pendidikan yang harmonis dan inklusif. Toleransi tidak hanya dipahami sebagai kemampuan untuk menerima perbedaan, tetapi juga sebagai sikap aktif dalam menghargai, menghormati, dan menjaga kerukunan di tengah keberagaman. Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal berperan strategis dalam menanamkan nilai toleransi karena di dalamnya terdapat interaksi yang intens antara peserta didik dengan latar belakang yang beragam. Menurut Hidayat (2021), sekolah berfungsi sebagai arena sosialisasi di mana peserta didik belajar memahami dan menginternalisasi nilai-nilai kebersamaan, termasuk toleransi, melalui proses pembelajaran maupun interaksi sehari-hari.

Dalam kegiatan belajar, implementasi nilai toleransi dapat diwujudkan melalui pendekatan pembelajaran yang berorientasi pada partisipasi aktif dan penghargaan terhadap pendapat siswa. Guru memiliki peran kunci dalam menciptakan ruang diskusi yang inklusif, di mana setiap peserta didik bebas menyampaikan pandangannya tanpa takut didiskriminasi. Menurut Hasanah (2022) Guru adalah seorang individu yang memberikan pendidikan dan pembelajaran kepada peserta didik untuk menjadi generasi penerus bangsa. Guru memiliki peran strategis dalam menciptakan suasana belajar yang kondusif dan menyenangkan, karena guru merupakan aktor utama yang berada di garis depan dalam interaksi langsung dengan peserta didik di ruang kelas. Pembelajaran berbasis diskusi kelompok, kerja sama lintas siswa dengan latar belakang berbeda, serta pembiasaan untuk mendengarkan pendapat orang lain merupakan strategi yang dapat memperkuat nilai toleransi (Nurhadi & Santoso, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa toleransi bukan hanya diajarkan secara teoretis, melainkan dipraktikkan langsung dalam proses belajar mengajar.

Kehidupan sekolah di luar kelas juga memiliki peranan penting dalam menumbuhkan sikap toleransi. Interaksi sosial antar siswa dalam kegiatan

ekstrakurikuler, organisasi, maupun aktivitas keagamaan di sekolah mencerminkan sejauh mana toleransi dapat diimplementasikan. Lingkungan sekolah yang memfasilitasi keberagaman kegiatan keagamaan dan budaya memberikan ruang bagi peserta didik untuk menjalankan keyakinannya, sekaligus belajar menghargai perbedaan teman-temannya. Studi yang dilakukan oleh Dewi (2022) menegaskan bahwa aktivitas ekstrakurikuler lintas agama dan budaya mampu memperkuat solidaritas antar siswa, karena mereka terbiasa bekerja sama tanpa membedakan latar belakang kepercayaan. Menurut Abidin (2015) Sebagai pengajar dan pendidik guru harus memiliki kompetensi atau kemampuan yang sesuai dalam pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Suasana belajar yang efektif tidak hanya ditentukan oleh aspek materi dan kurikulum, tetapi juga oleh kemampuan guru dalam membangun relasi interpersonal, menciptakan kenyamanan psikologis, dan menyusun strategi pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan siswa.

Selain guru, kepemimpinan sekolah juga memiliki andil besar dalam implementasi nilai toleransi. Kepala sekolah dan tenaga pendidik perlu menciptakan iklim sekolah yang inklusif dengan menegakkan aturan yang adil dan tidak diskriminatif. Kebijakan sekolah yang mendukung pelaksanaan ibadah sesuai agama masing-masing, pengaturan jadwal kegiatan agar tidak bertabrakan dengan hari besar agama tertentu, serta penekanan pada dialog antar siswa merupakan wujud nyata implementasi nilai toleransi (Setiawan, 2021). Hal ini menegaskan bahwa toleransi di sekolah tidak hanya menjadi tanggung jawab guru dalam kelas, melainkan juga bagian dari budaya organisasi sekolah.

Implementasi nilai toleransi dalam kehidupan sekolah juga dipengaruhi oleh pola interaksi siswa sehari-hari. Perbedaan yang ada di antara mereka sering kali menjadi tantangan, tetapi sekaligus peluang untuk mengembangkan keterampilan sosial. Menurut penelitian Rahmawati (2020), interaksi sosial yang terjalin dalam kegiatan sehari-hari di sekolah dapat membentuk pola sikap toleran apabila didukung oleh lingkungan yang kondusif dan kebijakan yang berpihak pada keberagaman. Interaksi antar siswa menjadi

laboratorium sosial yang efektif untuk menanamkan sikap menghargai perbedaan.

Dalam konteks pendidikan nasional, implementasi nilai toleransi sejalan dengan program penguatan pendidikan karakter yang digagas oleh pemerintah. Program ini menekankan pentingnya lima nilai utama, yakni religiusitas, nasionalisme, kemandirian, gotong royong, dan integritas. Di antara nilai tersebut, toleransi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penguatan karakter bangsa. Melalui pendidikan karakter, peserta didik dibiasakan untuk menginternalisasi sikap saling menghormati dalam kehidupan sekolah. Penelitian Suryana (2021) menunjukkan bahwa sekolah yang mengintegrasikan pendidikan karakter ke dalam kurikulum dan kegiatan sekolah berhasil membentuk lingkungan belajar yang lebih harmonis serta meningkatkan perilaku toleran siswa.

Secara keseluruhan, implementasi nilai toleransi dalam kegiatan belajar dan kehidupan sekolah dapat dilihat melalui tiga aspek utama. Pertama, kegiatan belajar di kelas yang menekankan diskusi, kerja sama, dan penghargaan terhadap perbedaan pendapat. Kedua, kehidupan sekolah di luar kelas yang difasilitasi melalui kegiatan ekstrakurikuler, organisasi siswa, serta aktivitas keagamaan yang inklusif. Ketiga, kepemimpinan sekolah yang berorientasi pada penguatan budaya toleransi melalui kebijakan yang mendukung keberagaman. Dengan kombinasi ketiga aspek ini, sekolah dapat menjadi wadah pembentukan generasi muda yang mampu hidup berdampingan secara damai, sekaligus siap menghadapi tantangan keberagaman dalam kehidupan bermasyarakat.

## **B. Kajian Penelitian Yang Relevan**

1. Penelitian ini dilakukan oleh Hendrawan, D. Pada tahun 2020 dengan judul Strategi Pembelajaran Inklusif Di Sekolah Multikultural, Penelitian ini mengkaji strategi implementasi multikulturalisme dan kearifan lokal dalam sistem pendidikan di Indonesia, menggunakan metode studi literatur kualitatif naratif. Fokus penelitian adalah mengidentifikasi model integratif

yang dapat menciptakan pengalaman pendidikan multikultural yang bermakna, kontekstual, dan transformatif. Implementasi multikulturalisme dalam pendidikan adalah proses kompleks yang memerlukan transformasi menyeluruh. Keberhasilan terletak pada rekonstruksi fundamental paradigma pendidikan yang menghargai keberagaman sebagai modal strategis. Strategi efektif memerlukan pendekatan holistik yang mencakup pengembangan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan rekonstruksi kerangka pedagogis. Pengembangan kompetensi antarbudaya dan integrasi kearifan lokal secara dinamis dan partisipatif adalah kunci untuk menciptakan pendidikan multikultural yang bermakna.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Imam Safi'i, Sobri, Hery Muljono, dan Annisa Aprilia Fitri 2024 dengan judul Implementasi Pendidikan Multikultural: Survei Dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia Di SMA DKI Jakarta, Mengkaji implementasi pendidikan multikultural dalam pembelajaran Bahasa Indonesia di tingkat SMA di wilayah DKI Jakarta. Menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain survei terhadap 377 siswa, penelitian ini menemukan bahwa sebagian besar siswa menunjukkan respons positif terhadap nilai-nilai multikultural yang terintegrasi dalam pembelajaran, terutama dalam aspek pembentukan karakter berbudaya, pengajaran nilai-nilai kemanusiaan, penghargaan terhadap perbedaan, dan evaluasi pembelajaran berbasis budaya.

Studi ini menekankan pentingnya pendidikan multikultural untuk menumbuhkan sikap toleransi dan saling menghargai antar siswa di tengah keberagaman budaya. Meskipun implementasinya sudah terlihat cukup baik, masih ditemukan beberapa tantangan seperti kurangnya integrasi optimal dalam kurikulum dan pemahaman guru terhadap nilai-nilai multikultural. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan multikultural berperan strategis dalam membentuk peserta didik yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki kebijaksanaan dalam menghargai keberagaman sosial dan budaya di Indonesia.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Gultom dan Lubis 2024 dengan judul Implementasi Pendidikan Agama Islam Berbasis Multikultural pada Siswa Kelas XI SMA Abdi Negara Binjai, bertujuan untuk mengeksplorasi implementasi Pendidikan Agama Islam berbasis multikultural di lingkungan sekolah menengah atas. Menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus, data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dari guru, kepala sekolah, dan siswa di SMA Abdi Negara Binjai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan pendidikan multikultural yang diterapkan melalui pembelajaran Pendidikan Agama Islam dapat menumbuhkan sikap saling menghargai dan toleransi antar peserta didik yang memiliki latar belakang agama, ras, dan budaya yang berbeda.

Dalam praktiknya, guru Pendidikan Agama Islam tidak memaksa siswa non-Muslim untuk mengikuti pelajaran, namun memberikan mereka pilihan untuk tetap berada di kelas atau mengerjakan tugas keterampilan di luar kelas. Sikap ini mencerminkan implementasi nilai-nilai multikultural yang menekankan pada kebebasan beragama dan toleransi. Selain itu, kegiatan sekolah seperti peringatan hari besar keagamaan, gotong royong, dan doa bersama turut mendukung terbentuknya lingkungan inklusif yang memperkuat keberagaman.

Penelitian ini juga mengidentifikasi sejumlah faktor pendukung seperti kebijakan sekolah yang terbuka, peran aktif guru, komunikasi yang baik antar warga sekolah, serta tersedianya sarana pembelajaran yang mendukung. Di sisi lain, tantangan yang dihadapi antara lain adalah keterbatasan media pembelajaran tentang keragaman dan kurangnya pemahaman siswa terkait implementasi nilai toleransi dalam kehidupan sehari-hari.

4. penelitian ini dilakukan oleh Sari Pitri, Elvi khairiah dan safriadi pada tahun 2023 dengan judul Manajemen Pembelajaran PAI Dalam Implementasi Multikulturalisme Kepada Siswa Di SMA 1 Badar Aceh Tenggara. Penelitian ini mengkaji bagaimana guru Pendidikan Agama Islam (PAI) mengelola proses pembelajaran untuk mengimplementasikan nilai-

nilai multikulturalisme di lingkungan sekolah yang memiliki keberagaman etnis seperti suku Alas, Gayo, Melayu, dan Batak. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru PAI memainkan peran sentral dalam menanamkan nilai-nilai multikultural melalui tiga tahapan manajemen pembelajaran: perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Guru merancang pembelajaran dengan memasukkan sikap-sikap multikultural seperti toleransi, tolong-menolong, kesetaraan, kerjasama, dan penggunaan bahasa yang inklusif. Dalam pelaksanaannya, guru menciptakan interaksi antar siswa lintas suku melalui tugas kelompok dan diskusi yang mendorong saling memahami dan menghargai perbedaan. Evaluasi dilakukan dengan mencatat perkembangan sikap siswa terhadap nilai-nilai tersebut dalam jurnal pembelajaran.

Penelitian ini menunjukkan bahwa pembelajaran PAI tidak hanya sebagai sarana pengajaran agama, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam membangun karakter siswa yang toleran dan inklusif dalam keragaman budaya. Hal ini menjadikan manajemen pembelajaran PAI sebagai kunci utama dalam mendukung terciptanya lingkungan belajar yang harmonis dan bebas konflik etnis di sekolah.

5. Penelitian ini dilakukan oleh Maesa Nila Sari dan Darmiyati Zuchdi pada tahun 2018 dengan judul Aktualisasi Nilai-Nilai Multikultural Di SMA Taruna Nusantara Magelang. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana proses aktualisasi nilai-nilai multikultural dilakukan di lingkungan SMA Taruna Nusantara Magelang, sebuah sekolah berasrama dengan latar belakang siswa yang sangat beragam secara etnis, budaya, dan agama. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktualisasi nilai-nilai multikultural dilakukan melalui tiga pendekatan utama: pembelajaran di kelas, kegiatan ekstrakurikuler, dan pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam

pembelajaran di kelas, guru mengintegrasikan nilai-nilai seperti toleransi, empati, kerja sama, dan keadilan ke dalam materi pelajaran. Kegiatan ekstrakurikuler seperti forum diskusi dan latihan kepemimpinan lintas budaya menjadi wadah untuk memperkuat interaksi dan pemahaman antarsuku dan antaragama. Sementara itu, dalam kehidupan sehari-hari di asrama, siswa dibiasakan hidup berdampingan dan saling menghargai dengan prinsip kesetaraan.

Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan aktualisasi nilai-nilai multikultural sangat dipengaruhi oleh budaya sekolah yang dikelola secara sadar dan terstruktur. Peran guru dan pengasuh asrama sangat penting sebagai teladan dalam membangun lingkungan yang mendukung inklusivitas, serta memperkuat identitas kebangsaan siswa dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.

### **C. Kerangka Berpikir**

Keragaman agama di Indonesia merupakan kenyataan sosial yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat, termasuk di lingkungan sekolah. SMA Negeri 15 Bandar Lampung menjadi salah satu sekolah yang mencerminkan kondisi ini, dengan peserta didik yang menganut agama Islam, Kristen, dan Hindu. Keberagaman ini menuntut adanya kerukunan agar tercipta suasana belajar yang kondusif serta interaksi sosial yang harmonis.

Secara teoretis, kerukunan antar umat beragama dapat dipahami sebagai kondisi di mana individu atau kelompok dengan latar belakang keyakinan yang berbeda mampu hidup berdampingan secara damai, saling menghormati, serta bekerja sama dalam berbagai bidang kehidupan. Nilai kerukunan ini selaras dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika, yang menekankan pentingnya persatuan di tengah perbedaan. Pendidikan berperan strategis dalam menanamkan nilai-nilai toleransi dan kerukunan, baik melalui proses pembelajaran di kelas, pembiasaan di lingkungan sekolah, maupun interaksi sosial antarsiswa.

Kerangka berpikir dalam penelitian ini berangkat dari pemahaman bahwa kerukunan antar umat beragama tidak terjadi secara instan, melainkan

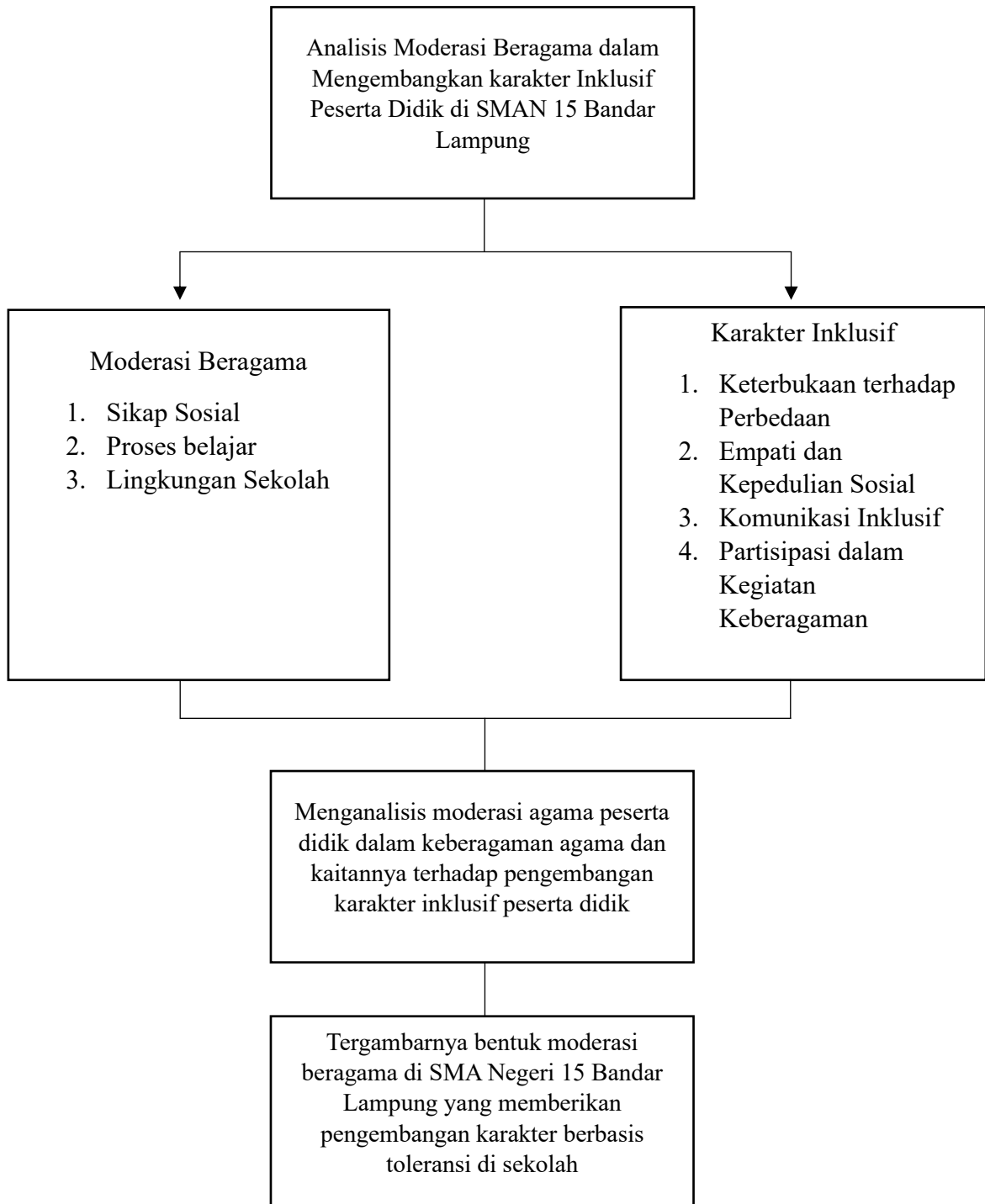
dipengaruhi oleh berbagai faktor. Guru dan pihak sekolah memiliki peran sentral dalam menciptakan iklim belajar yang inklusif dengan menanamkan sikap saling menghormati. Interaksi sosial antarsiswa yang melibatkan kerja sama lintas agama juga menjadi faktor penting dalam memperkuat kerukunan. Selain itu, kebijakan sekolah dan program kegiatan keagamaan turut mendukung terciptanya suasana harmonis.

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini berupaya menganalisis bagaimana kerukunan antar umat beragama diwujudkan oleh peserta didik di SMA Negeri 15 Bandar Lampung. Analisis dilakukan dengan melihat praktik kerukunan dalam kegiatan belajar di kelas, aktivitas keagamaan, serta dinamika sosial sehari-hari di sekolah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai bentuk-bentuk kerukunan yang ada, faktor pendukung, serta tantangan yang dihadapi.

Dari kerangka berpikir ini dapat digambarkan bahwa:

1. Keragaman agama peserta didik menuntut adanya sikap toleransi dan saling menghargai.
2. Peran guru, sekolah, dan kebijakan pendidikan menjadi faktor utama dalam membangun iklim kerukunan.
3. Interaksi sosial antarsiswa memperkuat praktik kerukunan melalui kerja sama lintas agama.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini diarahkan untuk memahami dan menganalisis bagaimana kerukunan antar umat beragama dapat terwujud di SMA Negeri 15 Bandar Lampung, serta bagaimana nilai tersebut tercermin dalam kehidupan sekolah sehari-hari.



*Sumber: Peneliti, 2025*

**Gambar 1. Kerangka Pikir**

### **III. METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif sebab peneliti akan memberikan pemahaman mengenai gambaran dari informasi yang diperoleh, bukan mengukur data yang didapat. Setelah itu informasi yang didapat akan dideskripsikan gambarnya oleh peneliti dalam membuat gambaran secara sistematis, faktual serta akurat mengenai fakta- fakta, fenomena yang diselidiki. Untuk memperoleh informasi dalam penelitian ini pula akan digunakan pendekatan kualitatif, dengan tujuan untuk memperjelas fenomena yang ada dengan Indonesia data dalam bentuk pemaparan kata- kata, gambar dan bukan dengan angka. Menurut Sugiyono (2016) metode deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci , teknik pengumpulan data dilakukan secara trigulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, metode penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif dipandang tepat untuk penelitian ini karena sasaran dan kajiannya adalah menjelaskan bagaimana kerukunan antar umat beragama terwujud pada peserta didik di SMA Negeri 15 Bandar Lampung,

#### **B. Waktu dan Tempat Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 15 Bandar Lampung yang berlokasi di Labuhan Dalam, Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung. Sekolah ini dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki keragaman agama yang mencerminkan kehidupan masyarakat Indonesia secara umum. Adapun waktu pelaksanaan penelitian dilakukan pada tahun 2025, selama proses observasi dan pengumpulan data berlangsung.

### **C. Kehadiran Peneliti**

Hal yang utama dalam penelitian ini adalah kehadiran peneliti yang esensial dalam seluruh proses penelitian dan harus dilakukan dengan maksimal. Keberadaan peneliti di tempat penelitian sangat penting karena hal tersebut akan memberikan data yang faktual tentang objek penelitian tanpa adanya manipulasi data. Terlebih lagi, adanya peneliti akan menciptakan hubungan yang akrab antara peneliti dan objek penelitian, sehingga data yang dikumpulkan akan memiliki keabsahan yang valid. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang memeriksa peristiwa-peristiwa kegiatan sosial alami dengan fokus pada cara individu memahami dan memahami pengalaman mereka guna memahami situasi sosial, sehingga mereka dapat memecahkan masalahnya sendiri (Mohajan, Haradhan, 2018). Metode penelitian deskriptif berusaha menggambarkan semua data atau objek penelitian serta menganalisis dan membandingkannya berdasarkan fakta saat ini, sambil mencari solusi untuk masalah yang ada agar tetap relevan. Data yang diperoleh bermanfaat untuk peningkatan pengetahuan dan dapat digunakan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan. Secara keseluruhan, penelitian deskriptif adalah usaha untuk menguraikan atau melukiskan peristiwa atau gejala secara teratur, berdasarkan fakta, dan tepat.

### **D. Data dan Sumber Data**

#### **1. Data Penelitian**

Data Penelitian kualitatif mengarah pada data yang berupa kata-kata yang berhubungan dengan karakteristik dalam bentuk sifat bukan angka. Pada jenis data penelitian kualitatif tidak dapat diukur melalui besar kecilnya nilai, akan tetapi melalui kegiatan observasi, wawancara, pengamatan, diskusi, dan dokumentasisehingga peneliti dapat memperoleh informasi dan data-data yang diperlukan dalam penelitian.

#### **2. Sumber Data**

Sumber data adalah asal atau tempat dari mana data diperoleh. Data bisa dikumpulkan dari berbagai sumber tergantung pada jenis informasi yang

dibutuhkan. Sumber data merupakan informasi yang didapat dalam penelitian. Sumber data dapat berupa benda, gerak, manusia, tempat dan sebagainya.

#### a. Data primer

Menurut Sugiyono (2016) Data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data primer didapatkan melalui kegiatan wawancara dengan subjek penelitian dan dengan observasi atau pengamatan langsung di lapangan. Data ini tidak tersedia dalam bentuk terkompilasi ataupun dalam bentuk file-file. Data ini harus dicari melalui narasumber atau dalam istilah teknisnya responden, yaitu orang yang kita jadikan objek penelitian atau orang yang kita jadikan 58 sebagai sarana mendapatkan informasi ataupun data. Dalam penelitian ini terdapat kriteria-kriteria informan adalah sebagai berikut :

**Tabel 2** Responden

<b>Jenis Informan</b>	<b>Informan</b>
Informan Kunci	Guru Pendidikan Pancasila
Informan Utama	Guru Pendidikan Agama Islam Guru Pembimbing Rohkris Guru Pembimbing Rohhin
Informan Tambahan	Siswa dari masing masing agama

*Sumber : peneliti, 2025*

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti dari sumber lain, baik lisan maupun tulis. Ini berarti bahwa data sekunder bukanlah data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti tapi telah ada sebelumnya dan dikumpulkan oleh pihak lain. Misalkan, data sensus penduduk, laporan keuangan perusahaan, atau informasi yang diberikan oleh institusi pemerintah. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan antara lain mencakup

dokumentasi resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berjudul laporan dan sebagainya.

### **E. Instrumen Penelitian**

Dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan instrumen utama atau human instrument. Peneliti berperan langsung dalam mengumpulkan data, memahami konteks sosial budaya, menafsirkan makna di balik tindakan dan peristiwa, serta melakukan analisis terhadap data yang diperoleh. Posisi peneliti sebagai instrumen utama menuntut adanya kesiapan pengetahuan, keterampilan, kepekaan, dan pemahaman terhadap konteks lapangan. Selain sebagai instrumen utama, peneliti juga menggunakan instrumen pendukung untuk meningkatkan ketepatan dan kelengkapan data yang dikumpulkan. Instrumen pendukung dalam penelitian ini meliputi:

#### **1. Pedoman Wawancara**

Peneliti menyusun pedoman wawancara semi-terstruktur yang berisi daftar pertanyaan terbuka yang difokuskan pada upaya menciptakan suasana belajar yang efektif dalam menghadapi keberagaman suku dan agama di sekolah. Pedoman ini dirancang untuk menggali pengalaman dan pandangan para informan, baik guru maupun peserta didik, mengenai praktik pembelajaran inklusif, interaksi sosial antar siswa, serta penerapan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sekolah sehari-hari. Wawancara diarahkan untuk memahami peran guru sebagai fasilitator suasana belajar yang menghargai keberagaman, strategi yang digunakan untuk mendorong sikap toleransi dan saling menghormati di antara siswa, serta tantangan yang dihadapi dalam mengelola keberagaman di lingkungan kelas. Selain itu, wawancara juga mengeksplorasi bagaimana siswa merasakan suasana belajar yang adil, aman, dan demokratis, serta bagaimana mereka memahami makna kebhinekaan dalam konteks kehidupan sekolah. Pedoman ini bersifat fleksibel agar peneliti dapat menyesuaikan arah wawancara sesuai respons dan pengalaman masing-masing informan, sehingga memungkinkan penggalian data yang lebih mendalam dan autentik.

## 2. Pedoman Observasi

Observasi dilakukan secara partisipatif dan non-partisipatif dalam proses pembelajaran serta aktivitas sosial yang berlangsung di lingkungan SMA Negeri 15 Bandar Lampung. Pedoman observasi difokuskan pada situasi nyata di kelas dan lingkungan sekolah yang mencerminkan bagaimana kerukunan antar umat beragama terjalin di antara peserta didik. Aspek-aspek yang diamati meliputi cara guru mengelola interaksi yang melibatkan siswa dengan latar belakang agama berbeda, bentuk penghargaan terhadap praktik keagamaan di sekolah, serta respons siswa dalam menjalin hubungan sosial lintas agama. Selain itu, observasi juga mencakup keterlibatan siswa dari berbagai agama dalam diskusi, kerja kelompok, maupun kegiatan bersama yang menekankan sikap saling menghormati. Peneliti memperhatikan simbol-simbol kebinekaan dan kerukunan yang muncul, baik melalui materi pembelajaran, perilaku guru, maupun dinamika sosial antarsiswa. Seluruh dinamika yang terjadi selama proses belajar dan interaksi sosial dicatat secara sistematis untuk menggambarkan wujud nyata kerukunan antar umat beragama di lingkungan sekolah.

## 3. Dokumentasi

Peneliti juga menggunakan kamera, rekaman suara, dan catatan lapangan untuk mendokumentasikan data visual dan verbal selama proses penelitian di SMA Negeri 15 Bandar Lampung. Dokumentasi dilakukan dalam berbagai kegiatan pembelajaran, interaksi siswa, serta situasi sosial yang mencerminkan praktik kerukunan antar umat beragama di lingkungan sekolah. Selain itu, dokumen tertulis seperti program kerja sekolah, dokumentasi kegiatan hari besar keagamaan dan nasional, foto kegiatan kelas yang memperlihatkan interaksi harmonis lintas agama, serta arsip kebijakan sekolah mengenai kerukunan dan toleransi dijadikan sebagai data pendukung. Semua bahan dokumentasi ini berfungsi untuk memperkaya hasil analisis dan memberikan bukti konkret atas temuan lapangan yang diperoleh melalui observasi dan wawancara.

#### 4. Catatan Lapangan (Field Notes)

Peneliti mencatat segala hal penting yang terjadi selama proses pengumpulan data di SMA Negeri 15 Bandar Lampung, mulai dari situasi pembelajaran di kelas, interaksi antarsiswa dari berbagai latar belakang agama, hingga sikap dan ekspresi non-verbal para informan saat proses wawancara berlangsung. Suasana sosial di lingkungan sekolah, termasuk pola komunikasi antar guru dan siswa, serta dinamika yang terjadi selama kegiatan pembelajaran maupun aktivitas nonformal, turut menjadi bagian penting dalam catatan. Peneliti juga mencatat refleksi pribadi terhadap temuan-temuan lapangan, baik yang muncul secara langsung maupun secara implisit dalam proses pengamatan dan wawancara. Semua catatan ini berfungsi sebagai sumber informasi kontekstual yang sangat berharga dalam memahami secara utuh realitas kerukunan antar umat beragama di sekolah, serta menjadi penunjang dalam proses interpretasi dan analisis data.

#### 5. Refleksi diri peneliti

Karena peneliti dalam penelitian kualitatif tidak sepenuhnya terlepas dari nilai dan subjektivitas, maka dilakukan refleksi secara berkala terhadap proses pengumpulan data, potensi bias, serta cara pandang terhadap dinamika kerukunan antar umat beragama di lingkungan sekolah. Refleksi ini dilakukan secara sadar untuk memahami posisi peneliti sebagai bagian dari proses interaksi dengan informan, serta untuk mengevaluasi bagaimana pandangan pribadi dapat memengaruhi interpretasi terhadap data yang dikumpulkan. Peneliti berusaha menjaga kepekaan terhadap konteks sosial sekolah, serta bersikap terbuka terhadap berbagai perspektif yang muncul selama observasi dan wawancara. Refleksi diri ini menjadi landasan penting untuk menjaga validitas, etika, dan integritas dalam pelaksanaan penelitian. Dengan menggunakan berbagai instrumen pengumpulan data secara terpadu dan reflektif, penelitian ini diharapkan mampu menangkap realitas kerukunan antar umat beragama secara utuh, mendalam, dan sesuai dengan konteks sekolah. Pendekatan yang beragam juga digunakan untuk meningkatkan kredibilitas, keabsahan data, serta memberikan gambaran

yang lebih komprehensif tentang bagaimana kerukunan antar umat beragama diwujudkan dalam praktik pendidikan sehari-hari di SMA Negeri 15 Bandar Lampung.

## **F. Teknik Pengumpulan Data**

Pengertian teknik pengumpulan data menurut Arikunto (2019) adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, di mana cara tersebut menunjukkan pada suatu yang abstrak, tidak dapat diwujudkan dalam benda yang kasat mata, tetapi dapat dipertontonkan penggunaannya.

### **1. Metode Wawancara**

Menurut Esterberg dalam Sugiyono (2019), wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Esterberg dalam Sugiyono (2019), mengemukakan beberapa macam wawancara, yaitu: wawancara terstruktur, wawancara semi terstruktur, dan tidak terstruktur

Dalam penelitian ini dilakukan wawancara secara langsung dengan beberapa informan, yang berupa pertanyaan - pertanyaan untuk mendapatkan informasi sebagai penguat dalam penelitian skripsi ini. Peneliti menggunakan wawancara semi terstruktur, agar peneliti dapat mengetahui hal - hal yang lebih mendalam tentang situasi dan fenomena yang terjadi. Wawancara semi terstruktur merupakan bentuk wawancara yang mula-mula peneliti menanyakan pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian satu persatu diperdalam mengorek keterangan lebih lanjut.

### **2. Metode Observasi**

Observasi atau pengamatan adalah suatu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung ke lapangan terhadap objek yang diteliti. Sugiyono (2017) menunjukkan bahwa observasi adalah proses yang kompleks, proses yang terdiri dari proses biologis dan psikologis, dua proses yang terpenting adalah proses pengamatan dan ingatan. Teknik observasi ini dipilih untuk memudahkan dalam mempelajari data sehingga peneliti dapat secara langsung mengkaji subjek dan objek pertanyaan

penelitian. Observasi ini menggunakan observasi partisipasi, di mana peneliti terlibat langsung dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Dalam observasi secara langsung ini, peneliti selain berlaku sebagai pengamat penuh yang dapat melakukan pengamatan terhadap gejala atau proses yang terjadi di dalam situasi yang sebenarnya yang langsung diamati oleh observer,

### **3. Metode Dokumentasi**

Dokumentasi menurut Sukmadinata (2007) merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik. dokumentasi dalam penelitian ini digunakan sebagai penunjang dan pelengkap yang berhubungan dengan fokus penelitian untuk melengkapi data dari hasil observasi dan wawancara maupun informasi yang telah diperoleh.

## **G. Uji Keabsahan Data**

Keabsahan data dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan kriteria kredibilitas. Untuk mendapatkan data yang relevan, maka peneliti melakukan pengecekan keabsahan data hasil penelitian dengan cara:

### **1. Kredibilitas (Kepercayaan)**

Uji kredibilitas ini bertujuan untuk menguji keautentikan atau keabsahan data agar hasil penelitian yang dilakukan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Beberapa strategi penelitian kualitatif yang dapat dilakukan untuk uji kredibilitas adalah sebagai berikut:

#### **1. Perpanjangan Penelitian**

Dengan memperpanjang penelitian, peneliti memeriksa ulang apakah data yang sebelumnya diberikan, setelah dicek pada sumber data asli atau sumber data lain, ternyata tidak akurat. Jika demikian, peneliti akan melakukan pengamatan lebih mendalam dan menyeluruh agar data yang diperoleh benar-benar valid. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan perpanjangan pengamatan dengan kembali ke lapangan untuk

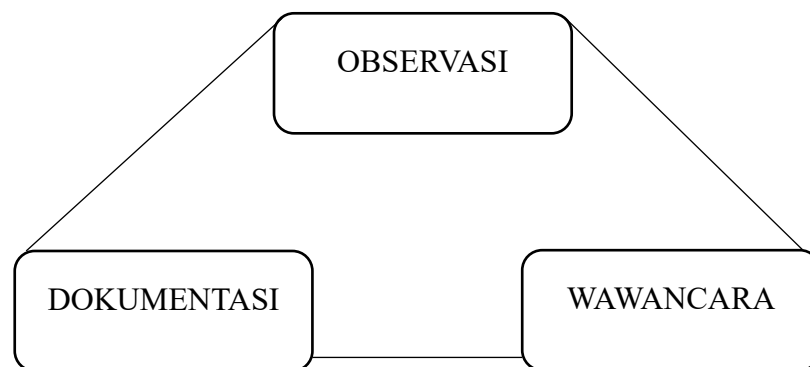
memastikan apakah data yang sudah dikumpulkan benar atau masih terdapat kesalahan.

## 2. Ketekunan Penelitian

Pada ketekunan pengamatan yang biasanya peneliti lakukan yaitu peneliti mendeskripsikan data secara akurat dan sistematis tentang apa yang diteliti. Dalam penelitian ini sebagai bahan untuk membantu peneliti dalam meningkatkan ketekunan adalah membaca referensi maupun hasil penelitian dan dokumen yang terkait dengan temuan-temuan yang diteliti. Dengan membaca banyak literatur maka wawasan peneliti akan semakin luas dan mendalam, sehingga dapat digunakan untuk memeriksa data yang telah diperoleh apakah data tersebut benar atau salah.

## 3. Triangulasi

Menurut Sugiyono (2019), triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Terdapat triangulasisumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu. Dalam penelitian ini 63 penulis menggunakan triangulasi metode. Methodological Triangulation atau triangulasi metode berarti mengecek data melalui sumber data yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya; data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dan dokumentasi. Jika menghasilkan data yang berbeda-beda, bisa jadi semuanya benar, karena sudut pandang yang berbeda-beda pula, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut dengan sumber data yang bersangkutan atau sumber data yang lain, untuk memastikan data mana yang dianggap paling benar. Triangulasi dapat dilihat pada gambar di bawah:



**Gambar 2. Triangulasi**

## **2. *Confirmabilitas (Kepastian)***

Uji konfirmabilitas adalah salah satu teknik dalam penelitian kualitatif yang digunakan untuk menguji objektivitas hasil penelitian. Tujuannya adalah memastikan bahwa hasil yang diperoleh dapat dipercaya dan merupakan refleksi dari data yang dikumpulkan, bukan hasil dari bias peneliti. Uji ini dilakukan dengan mengaitkan hasil penelitian dengan proses pengumpulan data, sehingga jika hasilnya dapat dipertanggungjawabkan dan disepakati oleh banyak pihak, maka penelitian tersebut dianggap kredibel.

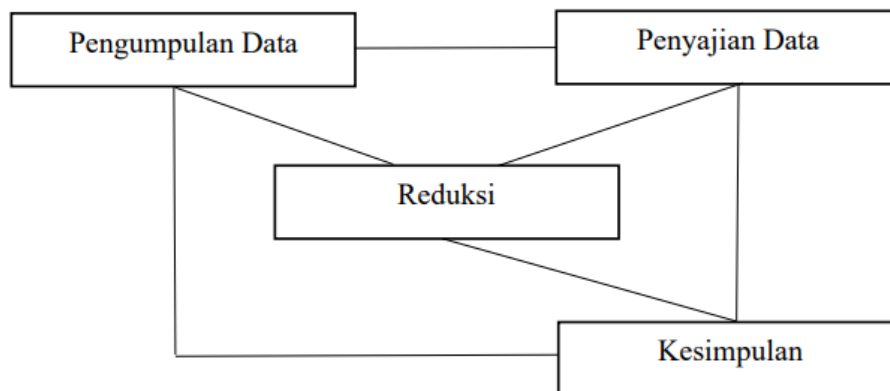
## **H. Teknik Analisa Data**

Analisis data adalah usaha meliputi proses menemukan dan mengganti data dengan cara yang sistematis dari hasil wawancara, observasi, dan sumber lainnya. Tujuannya agar peneliti dapat memahami kasus yang sedang diteliti dan menyiapkannya untuk penemuan di masa depan. Penting untuk melanjutkan analisis dengan mencari makna guna meningkatkan pemahaman. Menggunakan data analisa sebagai metode untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang sedang diteliti dan menjadikannya sebagai temuan yang dapat dipertimbangkan oleh orang lain. Untuk meningkatkan pemahaman tersebut, diperlukan analisis yang lebih mendalam dengan upaya untuk mencari makna.

Miles dan Huberman (2017) menjelaskan bahwa analisa data penelitian kualitatif terdiri dari kata-kata, bukan urutan numerik. Data dikumpulkan dengan berbagai cara (observasi, wawancara, ringkasan dokumen, rekaman)

dan biasanya menjalani pemrosesan sebelum digunakan melalui perekaman, pengetikan, penyuntingan, atau transkripsi), namun analisis kualitatif masih melibatkan kata-kata yang biasanya disusun dalam teks yang diperluas.

Proses analisis data menurut Miles dan Huberman meliputi tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Menurut Miles dan Huberman, dalam melakukan analisis data penelitian kualitatif, peneliti perlu memahami konsep dasar analisis data terlebih dahulu. Analisis data dalam studi kualitatif dapat dilakukan setelah peneliti turun ke lapangan. Tema dan hipotesis dapat diidentifikasi melalui analisis data. Untuk mencapai tema dan merumuskan hipotesis, hal tersebut harus didasarkan pada tujuan penelitian dan perumusan masalah (Saleh, 2017).



**Gambar 3. Alur Analisa Data**

## V. KESIMPULAN

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai moderasi beragama dalam mengembangkan karakter inklusif, dapat di simpulkan bahwa moderasi beragama memiliki peran yang signifikan dalam membentuk karakter inklusif peserta didik di SMA Negeri 15 Bandar Lampung. Nilai-nilai moderasi beragama tidak hanya dipahami secara konseptual, tetapi telah terinternalisasi dalam perilaku sosial peserta didik melalui sikap saling menghargai, toleransi, empati, serta kepedulian terhadap sesama tanpa memandang perbedaan agama, suku, maupun latar belakang sosial.

Moderasi beragama tercermin dalam sikap sosial peserta didik yang menunjukkan perilaku inklusif dalam interaksi sehari-hari. Peserta didik mampu menjaga hubungan sosial yang harmonis, menghindari tindakan diskriminatif, serta menunjukkan kepedulian terhadap teman yang mengalami kesulitan sosial, seperti tersisih atau kurang mampu beradaptasi. Sikap tersebut memperlihatkan berkembangnya karakter inklusif yang menjadi fondasi terciptanya lingkungan belajar yang kondusif dan aman bagi seluruh warga sekolah.

Proses pembelajaran berperan penting dalam penguatan moderasi beragama, khususnya melalui peran guru yang adil, inklusif, dan tidak diskriminatif. Guru menjadi teladan dalam penggunaan bahasa yang santun, pemberian kesempatan yang setara kepada peserta didik, serta penanaman nilai-nilai kebhinekaan dalam kegiatan pembelajaran. Praktik ini sejalan dengan prinsip *equity pedagogy* dalam teori multikultural James A. Banks, di mana pembelajaran diarahkan untuk menciptakan keadilan dan kesetaraan bagi seluruh peserta didik.

Lingkungan sekolah di SMA Negeri 15 Bandar Lampung juga berkontribusi sebagai ruang sosial yang mendukung tumbuhnya moderasi beragama. Ketersediaan fasilitas ibadah, kebebasan menjalankan keyakinan, serta budaya sekolah yang menjunjung tinggi toleransi memperkuat interaksi lintas agama yang harmonis. Lingkungan sekolah tersebut menjadi wadah terbentuknya jejaring sosial yang sehat dan berkelanjutan.

Keterbukaan terhadap perbedaan, empati, kepedulian sosial, komunikasi inklusif, serta partisipasi peserta didik dalam kegiatan keberagaman menunjukkan berfungsinya modal sosial di lingkungan sekolah. Interaksi lintas kelompok agama membangun kepercayaan, solidaritas, dan kerja sama antarpeserta didik.

Penelitian ini juga menemukan adanya hambatan dalam implementasi moderasi beragama, terutama yang bersumber dari faktor individu peserta didik, seperti perbedaan karakter, rendahnya kesadaran sosial, serta kurangnya kedisiplinan dalam menjalankan aktivitas tertentu. Hambatan ini menunjukkan bahwa penguatan moderasi beragama memerlukan pembinaan yang berkelanjutan dan kolaborasi antara guru, sekolah, dan peserta didik.

Secara keseluruhan, moderasi beragama di SMA Negeri 15 Bandar Lampung telah berjalan dengan baik dan berkontribusi nyata dalam membentuk karakter inklusif peserta didik. Namun, upaya penguatan nilai-nilai tersebut perlu terus dikembangkan secara sistematis agar tercipta lingkungan pendidikan yang semakin harmonis, adil, dan berkeadaban.

## **B. Saran**

### **1. Bagi Sekolah**

Sekolah diharapkan dapat terus memperkuat budaya moderasi beragama melalui kebijakan dan program yang berkelanjutan, seperti pengembangan kegiatan lintas agama, pembiasaan sikap toleransi, serta penciptaan lingkungan sekolah yang aman dan inklusif bagi seluruh peserta didik.

**2. Bagi Guru**

Guru diharapkan dapat mempertahankan dan meningkatkan sikap adil serta inklusif dalam proses pembelajaran, dengan menerapkan strategi pembelajaran kolaboratif yang mendorong interaksi positif antar peserta didik serta menanamkan nilai kebhinekaan secara konsisten.

**3. Bagi Peserta Didik**

Peserta didik diharapkan mampu menginternalisasi nilai moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah, dengan menunjukkan sikap saling menghargai, empati, dan kepedulian sosial terhadap sesama.

**4. Bagi Peneliti Selanjutnya**

Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji moderasi beragama dengan pendekatan dan konteks yang lebih luas, serta menggunakan metode penelitian yang beragam agar diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai penguatan karakter inklusif di lingkungan pendidikan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, R. F., Pitoewas, B., & Adha, M. M. 2015. Peran Guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam Mengembangkan Kecerdasan Moral Siswa. *Jurnal Ilmiah*, 13(1), 1–15.
- Adha, M. M. 2012. Pemahaman dan Implementasi Nilai Karakter dalam Kehidupan Sehari-Hari. *Jurnal Penjaminan Mutu Pendidikan*, 1(2), 219–228.
- Adha, M. M. 2015. Pendidikan Kewarganegaraan Mengoptimalkan Pemahaman Perbedaan Budaya Warga Masyarakat Indonesia dalam Kajian Manifestasi Pluralisme di Era Globalisasi. *Jurnal Manager Pendidikan*, 9(3), 1–10.
- Adha, M. M., & Yanzi, H. 2013. Model Pengembangan Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Multikultur dalam Rangka Menanamkan Nilai-Nilai HAM dan Demokrasi. *Media Komunikasi FIS*, 12(2), 1–16.
- Al-Afif, 2025. Tantangan dan Peluang Moderasi Beragama di Era Digital. *AEJ/Al-Afif Journal*.
- Albana, H. 2023. Implementasi Pendidikan Moderasi Beragama di Sekolah. *SMART Journal*.
- Anwar, M. 2022. Moderasi Beragama Sebagai Strategi Memperkuat Ketahanan Sosial Masyarakat Multikultural. *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 8(2), 101–115.
- Arikunto, S. 2019. *Prosedur Penelitian: suatu Pendekatan Praktek* (Edisi Ke-14, P.56). Rineka Cipta.
- Aullia, M. Z. 2024. Moderasi Beragama di Indonesia sebagai Bentuk Penguatan Identitas Nasional. *Jurnal Pancasila dan Kebangsaan*, 2(1), 15–32.
- Aziz, M. 2021. Religious Moderation in Indonesian Context. *Journal of Islamic Studies and Education*, 6(2).
- Azizah, N. 2020. Pendidikan Multikultural sebagai Upaya Menanamkan Sikap Toleransi Peserta Didik. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 5(2), 112–120.
- Azizah, N., & Rahman, H. 2023. Inclusive Character Education in Multicultural Schools: Building Empathy and Equality Among Students. *Journal Of Educational Development And Practice*, 7(2), 112–125.
- Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). 2023. Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dan Moderasi Agama (artikel/kajian). Jakarta: BPIP.
- Badan Pusat Statistik. 2022. *Provinsi Lampung dalam Angka 2022*. BPS Provinsi Lampung.
- Banks, J. A. 2015. *Cultural Diversity and Education: Foundations, Curriculum, And Teaching* (6th Ed.). Routledge.

- Banks, J. A. 2019. *Multicultural Education: Issues and Perspectives* (10th Ed.). Wiley.
- Darmi, R. 2023. Religious Moderation in Primary Education: Experiences of teachers. *JPai / UIN*.
- Dewi, A. P. 2022. Peran Kegiatan Ekstrakurikuler dalam Menumbuhkan Sikap Toleransi Peserta Didik. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 12(1), 45–58.
- Fadillah, M., Wulandari, D., & Rahman, T. 2020. Pendidikan Multikultural dan Penguatan Nilai Toleransi pada Siswa Sekolah Menengah. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 10(2), 155–167.
- Fahrudin, A. 2024. Religious Moderation and Deradicalization in Indonesian Higher Education. *Jurnal Edukasi (Kemenag)*.
- Fathurrahman, I., & Idris, A. 2022. Digital Religious Literacy and Moderation Challenges. *Journal of Digital Society*, 7(1).
- Fauzi, A. 2020. Indikator Moderasi Beragama dalam Kehidupan Sosial Masyarakat Indonesia. *Jurnal Pendidikan Islam*, 14(2), 211–225.
- Fauzi, A., & Rahman, M. 2023. Preventing Radicalism Through Religious Moderation in Schools. *International Journal of Multicultural Education*, 8(1).
- Gultom, N., & Lubis, S. 2022. Implementasi Pendidikan Agama Islam Berbasis Multikultural pada Siswa Kelas XI SMA Abdi Negara Binjai. *Jurnal Pendidikan dan Kewirausahaan*, 12(1). 409–421
- Hamid, F., & Noor, L. 2023. Online Radicalization and Religious Ethics. *Journal of Cyber Education*, 4(2).
- Hamidah, L. N. 2022. Implementation of Religious Moderation Values in College Students. *Jurnal ALT (IAIN Ambon)*.
- Hasanah, A. H., Adha, M. M., & Mentari, A. 2022. Peran Guru Penggerak dalam Mewujudkan Profil Pelajar Pancasila di Sekolah. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2(10), 6–14.
- Hasanah, N., & Wulandari, P. 2022. Moderasi Beragama dan Kohesi Sosial di Sekolah. *Jurnal Sosial Humaniora*, 13(1), 45–57.
- Helmawati, H. 2024. Islamic Religious Education and Religious Moderation at schools. *Jurnal Edukasi (Kemenag)*.
- Hendrawan, D. 2020. Strategi Pembelajaran Inklusif di Sekolah Multikultural. *Jurnal Pendidikan Multikultural*, 8(1), 33–45.
- Hidayat, R. 2021. Implementasi Nilai Toleransi dalam Pendidikan Multikultural di Sekolah Menengah. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 6(2), 110–123.
- Husna, M. H. 2024. Peran Pendidikan Agama Islam dalam Membangun Toleransi Antarumat Beragama di SMP. *Tadib: Jurnal Pendidikan Islam*, 3(2), 55–66.
- Integrasi Pendidikan Multikultural Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) Untuk Membentuk Karakter Toleran di SDN 037 Sabang Bandung (Laporan Penelitian). 2021. *Garuda Repository Kemdikbudristek*.
- Junaedi, A., Nasikhin, N., Hasanah, S., & Hassan, R. 2023. Experiential Approaches to Multicultural Education in Indonesian Schools: Reducing Prejudice Through Structured Contact. *Jurnal Pendidikan Multikultural*, 6(2), 98–116.

- Junaedi, M., Nasikhin, Hasanah, S., & Hassan, Z. 2023. Learning Patterns Influencing Attitudes of Religious Tolerance in Indonesian Universities. *Education Sciences*, 13(3), 285.
- Karmila, A., & Rahmah, N. 2024. Kerukunan Umat Beragama dan Implementasi Program Sekolah Moderasi. *Pedagogik: Jurnal Pendidikan*, 9(2), 120–132.
- Kementerian Agama Republik Indonesia Badan Litbang dan Diklat (SIMLITBANG). 2020. *Religious Moderation: Concept and Implementation*. Jakarta: Balitbang Kemenag.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. 2021. Modul Pelatihan Penggerak Penguatan Moderasi Beragama (versi resmi). Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI.
- Kementerian Agama RI. 2019. *Moderasi Beragama*. Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI.
- Khasanah, N. 2023. Moderate Islamic Education to Enhance Nationalism. *Qalamuna Journal*
- Latifah, N., & Putri, D. 2022. Pancasila and Religious Harmony: Strengthening National Identity. *Journal of Civic Education*, 4(1).
- Lestari, D. 2023. Inclusive Character Formation and Civic Engagement Among Indonesian Adolescents. *International Journal of Multicultural Studies*, 5(1), 45–60.
- Lestari, D. 2023. Inclusive Character Formation and Civic Engagement Among Indonesian Adolescents. *International Journal of Multicultural Studies*, 5(1), 45–60.
- Lestari, D. 2020. Pengelolaan Keberagaman Agama dalam Membentuk Sikap Toleransi Peserta Didik di Sekolah Menengah. *Jurnal Pendidikan Multikultural*, 4(2), 115–128.
- Lestari, S. 2023. Tantangan Intoleransi di Sekolah Menengah: Sebuah Studi Kasus. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 8(2), 120–134.
- Mahmud, A. 2022. Creating Inclusive School Climate Through Interfaith Dialogue and Multicultural Curriculum. *Indonesian Journal of Character Education*, 10(3), 211–227.
- Mahmud, Y. 2022. Kerukunan Antar Umat Beragama di Lingkungan Sekolah. *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 7(2), 77–95.
- Mahrus, M. 2024. Instilling religious moderation values in elementary schools. *Jurnal Edukasia*.
- Makinuddin, M., Zhamroni, M. F., & Sha'adah, L. M. 2022. Internalization of Religious Moderation Values in Societal Life. *Miyah: Jurnal Studi Islam*, 18(1).
- Mariyono, D. 2024. Indonesian Mosaic: The Essential Need for Multicultural Education. *Quality in Education and Administration*, 8(1), 12–29.
- Maulana, D. F., Palupijati, R. P., & Suharno. 2024. Cultivation Of Tolerance Values Through Multicultural Education to Build National Character. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 11(5), 103–111.

- Maulana, H., Suharno, S., & Palupijati, P. 2024. Multicultural Pedagogy and Inclusive Character Formation in Secondary Education. *Journal of Social Science and Education Policy*, 12(1), 31–47.
- Munif, M. 2023. Kebijakan Moderasi Beragama di Indonesia. *Dirasah: Jurnal Ilmu Agama dan Sosial*, 4(2), 88–101.
- Nila Sari, M., & Zuchdi, D. 2020. Aktualisasi Nilai-Nilai Multikultural di SMA Taruna Nusantara Magelang. *Harmoni Sosial: Jurnal Pendidikan IPS*, 7(2), 108–116.
- Noor, T. R., & Ikwandi, M. R. 2025. Analisis Problematika Pemahaman Moderasi Beragama Siswa Madrasah. *Kuttub*.
- Nurhadi, A., & Santoso, D. 2020. Pembelajaran Kolaboratif Sebagai Sarana Menumbuhkan Toleransi di Sekolah. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 8(2), 76–89.
- Nurhadi, F., & Santoso, B. 2020. Tolerance and Inclusivity in Classroom Interaction: A Qualitative Study in Indonesian High Schools. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 10(2), 120–135.
- Pitri, S., Khairiah, E., & Safriadi. 2022. Manajemen Pembelajaran PAI dalam Implementasi Multikulturalisme Kepada Siswa di SMA 1 Badar Aceh Tenggara. *FITRAH: International Islamic Education Journal*, 5(2), 173–185.
- Pratiwi, D. 2021. Implementasi Kurikulum Berbasis Toleransi dalam Pendidikan Multikultural. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 9(1), 45–58.
- Putnam, R. D. 2000. *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*. New York: Simon & Schuster.
- Putra, D. 2021. Implementasi Moderasi Beragama dalam Pendidikan Formal dan Nonformal. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 11(1), 56–70.
- Rachman, T. 2021. Moral Education and Inclusive Values in Indonesian Schools. *Journal of Ethics and Education*, 9(4), 155–169.
- Rahmawati, S. 2021. Pendidikan Berbasis Moderasi Beragama dalam Membangun Sikap Inklusif Peserta Didik. *Jurnal Civic Education*, 5(2), 89–103.
- Rahmawati, S. 2024. Constitutional Foundations of Religious Inclusivity in Indonesia. *Journal of Pancasila Studies*, 3(1).
- Rohman, M., & Nurhadi, A. 2021. Moderation and Inclusivity: Strengthening Religious Tolerance Through Education. *Jurnal Pendidikan Islam Indonesia*, 9(1), 87–100.
- Sa'idah, I. 2024. Level of religious moderation of students: survey analysis. *Al-Hiwar*.
- Safi'i, I., Sobri, S., Muljono, H., & Fitri, A. 2024. Implementasi Pendidikan Multikultural: Survei dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia di SMA DKI Jakarta. *MENDIDIK: Jurnal Kajian Pendidikan Dan Pengajaran*, 10(2), 94–102.
- Sakti, M. B., Adha, M. M., & Siswanto, E. 2020. Implementasi Pendidikan Berbasis Multikultural Sebagai Upaya Penguatan Nilai Karakter Toleransi dan Cinta Damai. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 11(2), 172–180.
- Sakti, S. A. 2024. Revitalizing Local Wisdom Within Character Education: Ethnopedagogy in Early Childhood in Indonesia. *Heliyon*, 10(4),

- Santosa, Y. B. P., Maulana, W., & Djono, D. 2024. Penguatan Nilai Toleransi Melalui Pendidikan Multikultural pada Pembelajaran Sejarah Jenjang SMA. *Artefak: Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, Universitas Galuh.
- Saputra, I. B. 2022. Religious moderation in Indonesia: A literature study. *EduReligio Journal*.
- Setiawan, B. 2021. Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Membangun Budaya Toleransi. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 9(1), 25–40.
- Sholeh, M. 2021. Substantial Understanding of Scriptures and Social Harmony. *Journal of Social Theology*, 5(3).
- Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D (Edisi Ke-10). Alfabeta.
- Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D (Edisi Ke-11, P.82). Alfabeta.
- Sugiyono. 2019. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D (Edisi Ke-12). Alfabeta.
- Sugiyono. 2019. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D (Edisi Ke-14). Alfabeta.
- Sukmadinata, N. S. 2007. Metode Penelitian Pendidikan (P. 45). PT Remaja Rosdakarya.
- Suryadinata, B. 2020. Religious Freedom and State Regulations in Indonesia. *Journal of Southeast Asian Politics*, 3(2).
- Suryana, I. 2021. Pendidikan Karakter Dan Penguatan Nilai Toleransi Di Sekolah. *Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 8(1), 55–70.
- Tantra, M. W. 2024. Penguatan moderasi beragama di Indonesia. *SIDU: Jurnal Sosial*.
- UNESCO. 2019. *Education For Peace And Sustainable Development*. UNESCO Publishing.
- UNESCO. 2020. *Education for Inclusion and Equity: Policy Guidelines*. Paris: UNESCO Publishing.
- Urgensi Pendidikan Multikultural Di Indonesia Di Zaman Serba Digital Artikel Review. 2024. *Garuda Repository Kemdikbudristek*.